

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENDALAMAN
PERMBERDAYAAN BERBASIS DAYA TANGKAL MASYARAKAT
TAHUN 2018**



**PEMBERDAYAAN BERBASIS DAYA TANGKAL MASYARAKAT
TERHADAP RADIKALISME DI PROPINSI MALUKU UTARA**

TIM PENELITI:

**DR. NAM RUMKEL, S.AG., M.H.
DR. ANSAR TOHE, M.AG.
AISYAH BAFAGI, S.PI., M.SI.
DRS. H. ISKANDAR M. DJAE
DRS. ISMIT ALKATIRI**

**FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME
PROPINSI MALUKU UTARA
2018**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENDALAMAN
PERMBERDAYAAN BERBASIS DAYA TANGKAL MASYARAKAT
TAHUN 2018**



**PEMBERDAYAAN BERBASIS DAYA TANGKAL MASYARAKAT
TERHADAP RADIKALISME DI PROPINSI MALUKU UTARA**

TIM PENELITIAN:

**DR. NAM RUMKEL, S.AG., M.H.
DR. ANSAR TOHE, M.AG.
AISYAH BAFAGI, S.PI., M.SI.
DRS. H. ISKANDAR M. DJAE
DRS. ISMIT ALKATIRI**

**FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME
PROPINSI MALUKU UTARA
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
FKPT PROVINSI MALUKU UTARA**

Judul Penelitian : Pemberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Propinsi Maluku Utara

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.
Jabatan dalam FKPT : Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian
Alamat : Ternate

Anggota Peneliti (ke-1)

Nama Lengkap : Dr. Ansar Tohe, M.Ag.
Jabatan dalam FKPT : Ketua Bidang Agama/Dakwah
Alamat : Ternate

Anggota Peneliti (ke-2)

Nama Lengkap : Aisyah Bafagi, S.Pi., M.Si.
Jabatan di FKPT : Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Pemuda
Alamat : Ternate

Anggota Peneliti (ke-3)

Nama Lengkap : Drs. H. Iskandar M. Djae
Jabatan di FKPT : Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Alamat : Ternate

Anggota Peneliti (ke-4)

Nama Lengkap : Drs. Ismit Alkatiri
Jabatan di FKPT : Ketua Bidang Pemberdayaan Media Massa
Alamat : Ternate

Tahun Pelaksanaan : 2018
Biaya Keseluruhan : Rp. 70.000.000

Ternate, 03 September 2018

Mengetahui,
Ketua FKPT

Ketua Peneliti,

Drs. Syamsudin A. Kadir

Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.

Menyetujui,
Direktur Pencegahan

.....

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Daftar Isi.....	iii
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Urgensi Penelitian	8
E. Kontribusi Terapan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Nilai –Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Utara yang Berfilosofi Pada Keempat Kesultanan Dengan Simbol Moloku Kie Raha	13
C. Radikalisme dan Terorisme	19
D. Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data.....	34
E. Tahapan Penelitian.....	34
F. Rencana Waktu Penelitian.....	34
BAB IV LUARAN PENELITIAN.....	36
BAB V RINCIAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN.....	37
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Implementasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Maluku Utara.....	38
B. Program Potensial Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan	

Kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara.....	67
C. Program-Program Alternatif yang Penting Dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara	82
BAB VII PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN (Dokumentasi Penelitian Lapangan)	

Abstrak

Berbicara mengenai terorisme di Propinsi Maluku Utara, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti FKPT Propinsi Maluku Utara yang didanai penuh oleh BNPT RI Tahun 2015, belum ditemukan data, kabar, atau tanda-tanda adanya terorisme, namun jika berbicara mengenai potensi adanya pemahaman radikal, maka hal tersebut tentu saja sangat berpotensi, atau dengan kata lain bahwa masyarakat di Propinsi Maluku Utara memiliki potensi pemahaman radikalisme sebagaimana hal ini juga terjadi (berpotensi) di seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Survei Nasional Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme yang dilaksanakan di Propinsi Maluku Utara ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang 2 hal, yaitu: Pertama, bahwa potensi radikalisme di Propinsi Maluku Utara berada pada skor 54,73 atau berada pada kategori "sedang". Kedua, bahwa masyarakat pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk membendung perkembangan radikalisme melalui daya tangkal yang dimiliki. Untuk mengetahui pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. Tujuan penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara adalah 1). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara selama ini, 2). Untuk menemukan program potensial yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan (sebagai variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang dominan) di Propinsi Maluku Utara, dan 3). Untuk menemukan program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara dengan bersinergi dengan *stakeholders* sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosial dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Rencana waktu penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara adalah pada bulan Maret hingga Juli 2018 dengan mengambil sampel di Kota Ternate, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, dan Kab. Pulau Morotai.

Kata Kunci: pemberdayaan, daya tangkal, berbasis masyarakat, Maluku Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan kecanggihan teknologi komunikasi informasi yang sedang berlangsung saat ini memiliki dua sisi, disatu sisi menimbulkan efek positif karena setiap orang akan sangat mudah dan terbantu dalam hal berkomunikasi, menjalankan hubungan baik itu perdagangan, bisnis, kerjasama pendidikan dan lain-lain, serta sangat dimanjakan dalam memperoleh informasi apapun yang dibutuhkan. Namun disisi lain, kecanggihan teknologi komunikasi informasi ini juga memiliki efek negatif yang tidak kalah besarnya, karena apapun yang terjadi akan cepat viral (menyebar) baik itu melalui lini masa maupun media social yang sangat banyak macamnya. Penyebaran informasi ini, terlebih informasi yang berkaitan dengan konten suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan sangat rentan akan perpecahan di antara sesamanya karena perbedaan sudut pandang dan paradigma dalam menyikapi isu SARA tersebut.

Setiap manusia menghendaki yang namanya kedamaian. Kedamaian bisa tercipta jika setiap manusia dapat berlaku toleran terhadap sesama manusia lainnya, sehingga sikap toleransi ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pertikaian, perkelahian, teror yang menyebabkan perasaan was-was dan ketidaknyamanan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, sikap teloran dapat dikarenakan perbedaan suku, budaya, dan agama (Nam Rumkel, dkk,

2015). Perbedaan-perbedaan inilah jika tidak disikapi dengan bijak dan tidak adanya program pengayaan atau penghayatan terhadap nilai-nilai leluhur (kearifan local) akan berakibat sangat fatal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia, mengatur bahwa:

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan aturan dasar tersebut, maka perbuatan intoleran dalam bentuk apapun yang berujung pada tindakan radikal, sehingga membuat perasaan was-was dan ketidaknyamanan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat sangatlah dilarang, selain karena melanggar aturan positif yang berlaku di Indonesia juga karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Radikalisme tidak sama dengan terorisme, namun tindakan radikal bisa berujung kepada perbuatan teror terhadap orang lain, sekelompok orang, dan bahkan terhadap pemerintah (atau yang lazimnya disebut sebagai terorisme). Hal ini perlu diperjelas oleh pemerintah atau aparat hukum yang berwenang, sehingga dapat teridentifikasi dengan baik apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan radikal, ataukah sudah

sampai ke tahap perbuatan teror (Nam Rumkel, dkk, 2015). Hal tersebut perlu di justifikasi, karena selain akibat yang ditimbulkan akan berbeda dan persepsi di antara penegak hukum juga harus tidak boleh berbeda yang berujung pada diskriminasi perlakuan atau ketidak profesionalan dalam menangani perkara radikalisme dan terorisme.

Radikalisme adalah paham atau aliran yg menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan (www.artikata.com), Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan (Wahid Hambali, 2013). Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya (www.referensimakalah.com), pengertian terakhir inilah yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat.

Proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu, sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan (Adi Sulisty, 2014 dalam Wilner., A. & Dubouloz., C-J,

2009). Sedangkan terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil (id.wikipedia.org), dengan demikian perbuatan teror yang dilakukan oleh teroris lebih berbahaya jika dibandingkan dengan perang.

Istilah teroris oleh para ahli kontra terorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain (id.wikipedia.org), atau dalam istilah hukum internasional dikenal sebagai kaum *belligerent* (Birkah Latif dan Kadarudin, 2013). Kegiatan terorisme yang beberapa kali terjadi, baik di ibukota negara, maupun di beberapa wilayah di Indonesia menandakan eksistensi teror di Indonesia sangatlah nyata.

Propinsi Maluku Utara merupakan salah satu propinsi dari total 34 propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Ibukota terletak di Sofifi,

Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi. Di Propinsi Maluku Utara sendiri terdiri dari 10 kabupaten/kota, dengan susunan 8 kabupaten dan 2 kota, komposisinya sebagai berikut:

1. Kabupaten Halmahera Barat (Ibukota Jailolo);
2. Kabupaten Halmahera Tengah (Ibukota Weda);
3. Kabupaten Halmahera Utara (Ibukota Tobelo);
4. Kabupaten Halmahera Selatan (Ibukota Labuha);
5. Kabupaten Halmahera Timur (Ibukota Maba);
6. Kabupaten Kepulauan Sula (Ibukota Sainana);
7. Kabupaten Pulau Morotai (Ibukota Daruba);
8. Kabupaten Pulau Taliabu (Ibukota Bobong);
9. Kota Ternate (Ibukota Ternate);
10. Kota Tidore Kepulauan (Ibukota Soasiu).

Berbicara mengenai terorisme di Propinsi Maluku Utara, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Maluku Utara yang didanai penuh oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Tahun 2015, belum ditemukan data, kabar, atau tanda-tanda adanya terorisme, namun jika berbicara mengenai potensi adanya pemahaman radikal, maka hal tersebut tentu saja sangat berpotensi, atau dengan kata lain bahwa masyarakat di

Propinsi Maluku Utara memiliki potensi pemahaman radikalisme sebagaimana hal ini juga terjadi (berpotensi) di seluruh propinsi yang ada di Indonesia.

Survei Nasional Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme yang dilaksanakan di Propinsi Maluku Utara ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang 2 hal, yaitu: Pertama, bahwa potensi radikalisme di Propinsi Maluku Utara berada pada skor 54,73 atau berada pada kategori "sedang". Potensi radikalisme ini dilihat dari 3 dimensi, yaitu pemahaman, sikap, dan tindakan. Pada dimensi pemahaman berada pada kategori "tinggi" dengan skor 62,58 (pemahaman), sedangkan pada dimensi sikap dan tindakan berada pada kategori "sedang", masing-masing dengan skor 54,82 (sikap) dan 46,8 (tindakan) [BNPT, 2017].

Kedua, bahwa masyarakat pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk membendung perkembangan radikalisme melalui daya tangkal yang dimiliki. Dari 6 variabel daya tangkal yang diuji, Propinsi Maluku Utara memiliki 3 daya tangkal secara berurutan sebagai berikut: 1) kesejahteraan, 2) kearifan local, dan 3) pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menurunkan atau bahkan menghilangkan radikalisme di masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan seluruh variabel daya tangkal, dengan tentunya melihat skala prioritas dari kedua variabel yang menjadi daya tangkal paling dominan, yaitu kesejahteraan dan kearifan lokal (BNPT, 2017). Sehingga peran aparat pemerintah di empat kesultanan melalui implementasi nilai-nilai kearifan lokal "*Moloku Kie Raha*" (lebih detail akan peneliti jelaskan pada bab tinjauan pustaka), sangat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme yang sangat

mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan baik di daerah maupun pengaruhnya pada skala nasional. Untuk mengetahui pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka tim peneliti dapat merumuskan masalah di dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara selama ini?
2. Program potensial apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan (sebagai variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang dominan) di Propinsi Maluku Utara?
3. Program-program alternatif apakah yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara dengan bersinergi dengan *stakeholders* sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara selama ini.
2. Untuk menemukan program potensial yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan (sebagai variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang dominan) di Propinsi Maluku Utara.
3. Untuk menemukan program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara dengan bersinergi dengan *stakeholders* sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

D. Urgensi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan, karena dapat berguna bagi BNPT dalam melihat implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara selama ini, memonitor program potensial yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang dominan di Propinsi Maluku Utara. Serta dapat menjadi acuan bagi BNPT dalam menyusun program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara dan bersinergi dengan *stakeholders* sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

E. Kontribusi Terapan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di atas, maka penelitian ini dapat berkontribusi sebagai informasi lebih mendalam bagi FKPT terkait temuan survei daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di level propinsi, sehingga BNPT-FKPT memiliki data kajian yang komprehensif terkait permasalahan radikalisme masyarakat berbasis kearifan lokal. Menjadi bahan dasar pembuatan *Policy Brief* Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme di level propinsi. *Policy Brief* Pemberdayaan Masyarakat ini menjadi acuan (pembuatan dan pelaksanaan) program bidang-bidang yang ada di FKPT, sehingga pemberdayaan masyarakat di level propinsi maupun nasional menjadi linier.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan radikalisme dan daya tangkal radikalisme sepanjang penelusuran tim peneliti, setidaknya ada 5 penelitian terkait dengan hal tersebut.

Pertama, Penelitian Ahmad Asrori yang berjudul “Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas”, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa radikalisme muncul di Indonesia disebabkan seiring perubahan tatanan sosial dan politik. Historisitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar, yaitu perkembangan di tingkat global, kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarginalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Sedangkan cara tepat di dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi

Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan

Kedua, Penelitian Abdul Munip yang berjudul "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menanggulangi paham radikalisme agama yang sudah berada di depan mata bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Perlu kerjasama yang erat antar berbagai elemen seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar agar paham-paham radikalisme tidak tumbuh subur di sekolah. Perlu segera diwaspadai, jika ada anggota masyarakat sekolah yang menunjukkan gejala terindikasi paham radikalisme, yang nampak dalam ciri-ciri fisik maupun jalan berpikirnya. Mereka bukan untuk dihindari tetapi perlu dirangkul dan diajak untuk kembali ke jalan Islam yang penuh kedamaian dan kesejukan. Tentu kita semua akan menyesal jika ada di antara anak didik kita atau keluarga kita ternyata telah terjerumus begitu jauh pada paham-paham radikal,

Ketiga, Penelitian Umma Farida yang berjudul "Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran dan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wajah pesantren di Indonesia sudah tidak lagi dimonopoli oleh kelompok Islam tradisional atau fundamental-radikal, melainkan sudah diwarnai oleh pesantren-pesantren baru yang dibentuk oleh kelompok Islam lainnya dengan wajah pesantren yang berbeda pula. Dari visi, tujuan, pola pendidikan, serta literature

yang digunakan, tampak bahwa pesantren yang berwajah radikal berkiblat kepada model Islam Timur Tengah. Sementara pesantren lama yang mendirikan lembaga baru di lingkungan pesantren, seperti kasus Ma'had Ali Situbondo menampilkan wajah pesantren yang akomodatif terhadap perubahan dan gagasan-gagasan baru. Dengan demikian, radikalisme dan liberalisme sebuah pesantren sangat tergantung para pemimpin pesantren tersebut (pemilik, kyai, atau santri senior). Jika arus pemikiran para pemimpinnya berkarakter radikal, maka pesantren dan isinya memiliki kecenderungan berpandangan radikal, sedangkan jika para pemimpinnya berkarakter moderat, maka sebuah pesantren beserta santrinya berkarakter moderat, bahkan bisa menjadi liberal dalam situasi dan waktu tertentu.

Keempat, Penelitian Iman Fauzi Ghifari yang berjudul "Radikalisme di Internet", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kehadiran teknologi, internet, media sosial sangat memberikan andil besar dalam menyebarkan paham radikal, menjadi media progapanda untuk melakukan tindakan intoleran, sebagai ajang rekrutmen, pelatihan, pendidikan, pembinaan jejaring anggota guna menebar aksi teror dan bom bunuh diri di bumi Nusantara ini. Dengan cara menggunakan konten-konten yang mengajak setiap pengunjung untuk mempraktikkan sikap toleransi, dialog antaragama, semangat pluralisme, hidup berdampingan, kerukunan, perdamaian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi sebagai upaya menanggulangi konflik horizontal dan vertikal.

Kelima, Penelitian Saifuddin yang berjudul "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru", dalam penelitian tersebut

dijelaskan bahwa fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa benar adanya, sesuatu yang dapat dipegang dan dipelajari, meskipun pada dasarnya gerakan seperti ini menggunakan sistem sel yang kasat mata, adanya ibarat angin yang bisa dirasakan tapi sulit dipegang. Namun demikian, kasus penangkapan terhadap jaringan Pepi Fernando menjadi bukti nyata sekaligus menegaskan bahwa gerakan radikal di kalangan mahasiswa sudah bisa dipegang dan dipelajari. Mahasiswa yang direkrut ke dalam gerakan-gerakan radikal biasanya berasal dari perguruan tinggi umum (sekuler) terlebih yang berasal dari fakultas eksakta. Namun demikian, perkembangan terbaru menginformasikan bahwa kampus berbasis keagamaan juga tidak luput dari sasaran perekrutan gerakan-gerakan radikal. Ada dua hal kenapa yang terakhir ini bisa terjadi: Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. Kedua, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal itu sendiri.

Kelima hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pandangan dalam membahas penelitian ini.

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Utara yang Berfilosofi Pada Keempat Kesultanan Dengan Simbol Moloku Kie Raha

Secara historis Maluku Utara, atau yang lebih akrab dikenal *Jazira Moloku Kie Raha*, salah satu provinsi di bagian timur Indonesia. Secara historis daerah ini merupakan daerah kesultanan dan sampai saat ini kesultanan tersebut masih ada seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Bacan, Kesultanan Jailolo. Daerah ini sejatinya menyimpan berbagai aneka ragam budaya yang

bukan saja menjadi menjadi identitas masyarakat local Maluku Utara tetapi juga identitas nasional maupun Internasional dengan memknai makna Moluku Kie Raha tersebut.

Menurut seorang sejarawan Maluku Utara Herry RD, Nachrawy, menjelaskan bahwa budaya-budaya lokal yang memiliki nilai-nilai sosial diantaranya:

1. *Babari*. Semacam gotong royong bersama membuka kebun, membangun rumah dengan tidak terikat waktu dimana pemilik kebun dan pemilik rumah memberi makan siang maupun malam hari kepada peserta pekerjaan dengan tidak terkait target.
2. *Morom* yaitu semacam arisan bergilir Jojobo, dalam hal pengadaan material pembangunan rumah (seng, semen, balok) dengan jumlah dibagi rata bagi sekelompok warga desa, tergantung pada jumlah yang disepakati.
3. *Oro Gia* yakni semacam pekerjaan gotong-royong pembukaan ladang panen (kelapa, cengkih, padi, coklat, pala, dst). Pembangunan rumah dalam satu hari secara relatif siap dipakai. Pemilik acara hanya menyediakan makanan pagi, siang, dan kudapan sore (setelah pulang Oro Gia).
4. *Talagami*, semacam cara kepercayaan yang dilakukan masyarakat melakukan duduk di tengah hutan yang akan dijadikan kebun baru, dengan memasang patok yang akan dihubungkan dan di doakan kebun baru membawa berkah. Dilakukan pada bulan purnama, air

pasang dimana menghindari hama tanaman dan waktu diperhitungkan pada saat binatang hutan lagi tidur.

5. *Haki* yakni upacara dilakukan pada saat menanam bibit pada kebun/ladang yang akan dibersihkan. Prosesinya adalah menanam periuk belanga berisi nasi kuning dan telur ditengah areal yang ditanami kemudian disiram air.
6. *Kakarai*. Semacam permintaan yang dilakukan lewat pembacaan doa secara bersama atau masal di tengah malam untuk dimohonkan datangnya hujan yang menyiram kebun mereka.
7. *Fonai*. Penangkapan ikan secara bersama untuk cakalang.
8. *Giop*. Penangkapan untuk jenis ikan julung secara bersama.

Selain itu, ada juga kebudayaan yang menjadi salah satu identitas negeri *Moluku Kie Raha*, memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi. Misalnya *Dola Bololo*, *Dalil Tifa*, *Dalil Moro*, *Cum-cum*, *Ino fomakati nyinga*, *Doka gosora se bualawa*, *Om doro foma kumote*, *Foma gogoru*, *fomaku dudara* dan syair lokal lainnya, memberikan pelajaran penting bagi masyarakat yang berada didaerah tersebut untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai yang mengantarkan pada kearifan dan kebijaksanaan dalam prosesi kehidupan. Nilai persatuan, sopan santun, etika dan tata cara interaksi sosial, diajarkan sebagaimana mestinya, serta diharapkan mampu untuk direalisasikan dalam kehidupan bersosial. Nilai sejarah yang diajarkan, menjadi sebuah perenungan besar, bagi setiap masyarakat Maluku Utara, yang nantinya dapat dipetik serta diharapkan dapat diterapkan pada prosesi kehidupan.

Selain dari nilai-nilai tersebut, terdapat salah satu pandangan filsafat masyarakat Moloku Kie Raha yang disebut dengan “Jou SeNgaofa Ngare” merupakan suatu sistem gagasan yang memuat pesan dan amanat para leluhur, kemudian menghasilkan “Kie Se Gam Magogugu Matiti Rara” di implementasikan melalui salah satu komponen budaya yakni bahasa yang mencerminkan enis-etnis tersebut. Namun dalam pemaknaanya yang dimaksud adalah bahasa Ternate.

Selain dari beberapa nilai-nilai kearifan lokal Moloku Kie Raha yang telah disebutkan diatas, dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan filsafat Maluku Kie Raha dikenal dengan “Adat Ma Toto Agama, Agama Ma Toto Kitabullah, Kitabullah Ma Toto Toma Jou Rasulullah, Jou Rasulullah Manyekulye Diki Amoi Nanga Kuasa Se Kodrati” (Adat-istiadat yang dimulai pada agama, agama yang dimulai pada Al-Qur’an, dan Al-Qur’an dimulai pengajaran Muhammad Saw, dia adalah Muhammad bagian atas hanyalah bimbingan dan bagian atas adalah Raja”.

Pandangan ini tidak terlepas dari kelahiran dari keempat kesultanan tersebut dari pengajaran agama yang masih kental dengan sejarah peradaban Islam di dunia, Pandangan hidup masyarakat inilah yang menjadi sebuah nilai lokal yang diaktualisasikan sebagai nilai-nilai fundamental dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. nilai budaya inilah yang melahirkan “Kie Se Gam Magogugu Matiti Rara” yakni terdapat enam nilai dasar yang masi dipegang dalam setiap masyarakat di wilayah Maluku Kie Raha yang juga dapat dimaknai sebagai nilai kearifan local dari keempat kesultanan tersebut. Ke-enam nilai

dasar tersebut antara lain adalah: (1) Adat *Seatoran*; (2) Istiadat *Se Kabсарang*; (3) *Galib Se Likudi*; (4) *Cing se Cingare*; (5) *Ngale se Cara/Duku*; (6) *Sere se Doniru*.

1. Adat *Se Atorang*, yakni hukum dasar yang harus dipatuhi menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya adat yang bersendikan aturan.
2. Istiadat *Se Kabasarang*, dimaksud adalah lembaga adat dengan kekuasaannya menurut ketentuan adat yang berlaku, dijunjung tinggi sebagaimana menjaga martabat orang.
3. *Galib Se Likudi*, yaitu Kebiasaan lama yang menjadi pegangan suku bangsa diatur, menurut sendi ketentuan yang dilajimkan dalam masyarakat dan disesuaikan dengan jaman tanpa ada pertentangan.
4. *Cing Se Cingare*, ketentuan pengaturan dan lelakinya. artinya setiap individu maupun pasangan pria dan wanita merupakan kesatuan yang utuh dengan hak dan kewajiban masing-masing, perlu dibina dan dijaga kelestariannya karena orang temate selalu memaknai filosofis laki-laki dan perempuan seperti yang dijelaskan.
5. *Ngale se cara/duku*, bentuk budaya masing-masing suku bangsa dapat digunakan secara bersama-sama sesuai dengan keinginan untuk keutuhan dalam perbedaan.
6. *Sere Se Duniru*, yakni tata kehidupan seni dan budaya dan kebiasaan yang timbul dalam pergaulan masyarakat, diterima secara bersama-sama.

Selain dari ke enam prinsip dasar tersebut, juga terdapat ungkapan yang biasa disebut dengan "*Rorasa Atau Bobaso Se Rasa*" (*bobaso serasai*) yakni, rorasa bentuk lisan berfungsi dalam kehidupan masyarakat lainnya berbentuk pernyataan perasaan, nasehat, serta petunjuk. Penyajiannya dilakukan pada acara/upacara serimonial tertentu, terutama dalam upacara adat. *Rorasa* merupakan prakata pada upacara adat penyajian harus disampaikan oleh pemuka adat atau agama. *Rorasa* dilakukan pada upacara seperti, pelantikan sultan, *sidego/sinonako* atau tanda, penerimaan tamu agung/*joko kaha*, upacara perkawinan, jamuan makanan adat, upacara penguburan sultan, upacara adat lainnya.

Berdasarkan dari ke enam landasan idil nilai-nilai budaya kearifan lokal *Moloku Kie Raha*, nyatanya dalam tantangan kekinian tidak dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat *Moloku Kie Raha*. Hal ini disebabkan karena kearifan lokal *Moloku Kie Raha* tidak mampu menjawab tantangan zaman oleh karena itu diharapkan dalam aktualisasi nilai-nilai budaya dalam enam prinsip tersebut sebagaimana terurai di atas. Menunjukkan bahwa kearifan lokal *Moloku Kie Raha* tidak dapat bersesuaian dengan dinamika budaya yang ada.

Pada dasarnya nilai-nilai kultural di *Moloku Kie Raha* itu seragam, namun tetap sesuai dengan struktur masyarakat dan lembaga adatnya masing-masing. Kesultanan Ternate dikenal dengan nilai *Coou*, yang dapat dimaknai dengan loyalitas penuh pada Kesultanan tanpa di gaji maupun harapan untuk mendapat imbalan. Sedangkan di Tidore dikenal dengan *Bari fola* yang

mengandung makna nilai gotong royong saling membantu antar sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bagi Bacan dan Jailolo pada dasarnya juga memiliki nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal “Moloku Kie Raha” di empat kesultanan ini sangat terkait (memiliki hubungan yang erat) dan berpengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

C. Radikalisme dan Terorisme

Kata Radikal dapat diartikan sebagai hilang sampai ke akar-akarnya; dengan sempurna; haluan politik yang amat keras menuntut perubahan undang-undang, ketatanegaraan dan sebagainya (Muhammad Ali, 2001). Sedangkan kata Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti “sama sekali” atau sampai ke akar akarnya. Dalam kamus Inggris Indonesia susunan Surawan Martinus kata *radical* disama-artikan (*synonym*) dengan kata “fundamentalis” dan “*extreme*”. Radikalisme yaitu suatu paham sosial/politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan (<http://ummatipress.com>).

Pengertian lain disebutkan bahwa Radikalisme adalah paham, sikap, atau perilaku yang ditandai adanya 4 ciri, yaitu: (1) intoleransi, (2) fanatik, (3) eksklusif, dan (4) revolusioner. Intoleransi artinya sikap yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, sehingga merasa pendapat atau keyakinannya yang paling benar. Intoleransi ini melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap diri atau kelompoknya sendiri, dan menganggap orang lain atau kelompok lain salah. Eksklusif yaitu membedakan diri atau cenderung

memisahkan diri dari kebiasaan umum, sehingga ingin memaksakan orang lain atau kelompok lain berlaku seperti dirinya melalui cara-cara kekerasan. Bentuk-bentuk gerakan radikalisme ini umumnya melahirkan gerakan-gerakan militan, gerakan fundamentalis, anarkisme, atau terorisme. Radikalisme ini memang tidak selamanya negatif, tergantung cara merealisasikan dan mengekspresikan serta cara pandang orang melihatnya. Namun radikalisme sering menjadi momok atau monster bagi banyak orang mengingat sifatnya yang menginginkan perubahan dalam waktu cepat seringkali identik dengan instabilitas politik dan keamanan (Susanti, tanpa tahun).

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984*, sebagai berikut:

“Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear” (Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa).

Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah

agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*. Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut (id.wikipedia.org).

Permasalahan paham radikalisme dan tindakan terorisme adalah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial, dan juga merupakan masalah personal seseorang. Masalah personal adalah masalah yang bermula dari *individual qualities* (kualitas-kualitas individual) atau dari lingkungan terdekat. Sebaliknya, masalah sosial bermula dari faktor atau lingkungan sosial (Jalaluddin Rakhmat, 2005), oleh karena itu kualitas individu dan lingkungan social sangat mempengaruhi terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme.

D. Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat

Jika dihubungkan dengan masyarakat, melawan terorisme salah satunya mengandalkan adanya *resource* dan kekuatan natural masyarakat untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi salah satu bentuk kejahatan luar biasa ini. Sumber daya dan kekuatan itu dapat berbentuk kemampuan masyarakat menggunakan segala *resource* yang dimiliki, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin menyelamatkan masyarakat dari bahaya terorisme. Secara sederhana, sumber daya dan kemampuan ini dapat disebut daya

tangkal masyarakat dalam menghadapi bahaya terorisme. Dalam konteks ini, mengidentifikasi, memahami, dan mengembangkan sumber daya dan kekuatan itu mesti dilakukan sejak dini mengingat radikalisme sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tujuan utama melawan terorisme dapat dicapai jika seluruh komponen masyarakat bahu-membahu dan bekerjasama, meski pada saat yang sama, setiap individu juga diharapkan memiliki kemampuan tertentu untuk melawan terorisme. Dalam kerangka inilah, daya tangkal masyarakat bisa saja bersifat individual atau kolektif (BNPT, 2018).

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan (L. Muarofah, 2014).

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011 dalam L. Muarofah, 2014). Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving M. Zeitlin, 1998 dalam L. Muarofah, 2014:22).

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1993). Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompokkelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005). Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Robert Lawang, 1994).

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya (L. Muarofah, 2014).

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, perbedaannya adalah (Robert H. Lauer, 2001):

1. Konflik Destruktif Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.
2. Konflik Konstruktif Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-

kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu (L. Muarofah, 2014):

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini,

jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerana ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011).

Teori konflik dari Ralf Dahrendorf dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural (George Ritzer, 2010). Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial (L. Muarofah, 2014) dan menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (George Ritzer, 2010).

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi

ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (Margaret M. Poloma, 2000). Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak kan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004).

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (George Ritzer, 2010). Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa

perbedaan didistribusikan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (L. Muarofah, 2014).

Berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan”. Menurut Dahrendorf tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan dalam masyarakat (L. Muarofah, 2014).

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Teori deviasi sosial menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi apabila seseorang atau

kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat disebut dengan deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*). Pada masyarakat tradisional penyimpangan jarang sekali terjadi dan dapat dikendalikan. Sebaliknya, pada masyarakat modern, penyimpangan dirasa semakin banyak dan bahkan seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lainnya. Salah satu bentuk penyimpangan adalah penyimpangan sosial. Seperti halnya kebudayaan yang bersifat relatif maka penyimpangan sosial juga bersifat relatif. Artinya, penyimpangan sosial sangat tergantung pada nilai dan norma sosial yang berlaku. Suatu tingkah laku dapat dikatakan menyimpang oleh suatu masyarakat, namun belum tentu dianggap menyimpang oleh masyarakat lain yang memiliki norma dan nilai yang berbeda. Pengertian penyimpangan sosial sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut (Rudi Haryanto, 2015):

- James W van de Zanden, penyimpangan sosial sebagai perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap tercela dan di luar batas toleransi;
- Bruce J. Cohen, penyimpangan sosial sebagai perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat (dalam buku Sosiologi : Suatu Pengantar, Terjemahan); dan
- Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu

sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang (dalam buku materi pokok pengantar sosiologi).

Jadi jelaslah bahwa teori deviasi sosial menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat pada masyarakat modern, penyimpangan dirasa semakin banyak dan bahkan seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lainnya, hal ini menimbulkan cap (label) di masyarakat terhadap orang yang melakukan penyimpangan tersebut. Edwin M. Lemerd yang berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer (pertama) lalu oleh masyarakat diberikan cap (label) sebagai penyimpang (pencuri, penjahat, dan lain sebagainya) maka orang tersebut terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder (kedua dan seterusnya) dengan alasan “kepalang tanggung”. Contohnya: orang yang pernah sekali mencuri karena alasan kebutuhan yang mendesak, tetapi kemudian dicap oleh masyarakat sebagai pencuri, maka ia akan terdorong menjadi pencuri, bahkan menjadi perampok. Namun dalam keadaan tertentu, pemberian cap ini justru akan mendorong kembalinya orang yang menyimpang untuk kembali berperilaku normal. Jadi, ini semua tergantung dari pelakunya (Rudi Haryanto, 2015).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial adalah sebagai berikut ini (Rudi Haryanto, 2015):

1. Sikap mental yang tidak sehat;

2. Ketidakharmonisan dalam keluarga;
3. Pelampiasan rasa kecewa;
4. Dorongan kebutuhan ekonomi;
5. Pengaruh lingkungan dan media massa;
6. Keinginan untuk dipuji;
7. Proses belajar yang menyimpang;
8. Ketidaksanggupan menyerap norma;
9. Adanya ikatan sosial yang berlain-lainan;
10. Proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang;
11. Kegagalan dalam proses sosialisasi.

Berbagai faktor di atas menjelaskan bahwa penyimpangan social yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh banyak hal, sehingga hal-hal tersebut (penyimpangan sosial) seyogyanya dapat di cegah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif, dalam kaitan dengan hal ini maka kearifan lokal berperan penting demi menunjang sistem hukum negara dalam mencegah dan menanggulangi penyimpangan sosial (atau dengan kategori lain sebagai paham radikalisme) yang terjadi di masyarakat yang bisa saja berujung pada perbuatan teror.

Secara spesifik, daya tangkal dimaknai sebagai kemampuan dan strategi atas segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan ancaman terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Daya tangkal tersebut dapat meliputi dimensi hukum dan ketertiban (*law and order*), kesejahteraan

dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), pertahanan dan keamanan (*defence and security*), keadilan hukum dan keadilan sosial (*judicial justice and social justice*), serta kebebasan (*freedom of the people*). Daya tangkal juga terkait erat dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang baru dari sesuatu yang sering dirasakan sebelumnya, sehingga seringkali terjadi upaya resistensi. Resistensi yang dimaksudkan adalah upaya penolakan terhadap upaya perubahan karena dapat mengusik zona nyaman (*comfort zone*) [BNPT, 2018].

Konsepsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) perlu mengacu kepada konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah laut, udara dan darat termasuk pulau-pulau besar dan kecil yang ada. Disamping itu kekuatan Hankam perlu antisipatif terhadap prediksi ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya perkembangan Informasi dan Teknologi yang sangat berpotensi berkembangnya radikalisme dan terorisme di wilayah-wilayah Indonesia, salahsatunya di Provinsi Maluku Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Maluku Utara. Dari populasi tersebut, maka ditariklah sampel penelitian di lima kabupaten/kota, yakni:

1. Kabupaten Halmahera Utara;
2. Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kota Tidore Kepulauan; dan
5. Kota Ternate.

Pemilihan 5 kabupaten/kota sebagai sampel penelitian adalah karena di lokasi-lokasi tersebut adalah daerah empat kesultanan dan satu wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Propinsi Maluku Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, maka dikumpulkanlah sejumlah data-data lapangan disertai dengan wawancara yang mendukung penelitian ini, dan

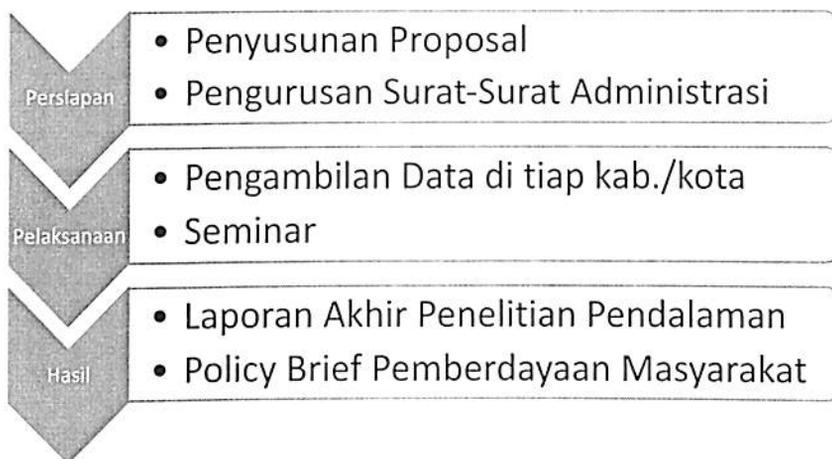
disempurnakan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dimaksud akan menggali informasi pada level operasional (*operating level information*) yang meliputi input-proses-output.

D. Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

E. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut:



F. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara adalah pada bulan Maret hingga Juli 2018, rinciannya tergambar dalam tabel berikut:

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Maret - April				Mei - Juni				Juli			
		1- 2	3- 4	1- 2	3- 4	1- 2	3- 4	1- 2	3- 4	1	2	3	4
1.	Pengurusan surat-surat administrasi												
2.	Penyiapan instrument (bahan) penelitian												
3.	Pengambilan data di Kota Ternate												
4.	Pengambilan data di Kab. Halmahera Utara												
5.	Pengambilan data di Kab. Halmahera Selatan												
6.	Pengambilan data di Kota Tidore Kepulauan												
7.	Pengambilan data di Kab. Halmahera Barat												
8.	Seminar												
9.	Penyusunan laporan kegiatan												
10.	Peny. laporan akhir												

BAB IV

LUARAN PENELITIAN

Luaran dari penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut:

1. **Laporan Penelitian Pendalaman**

Laporan penelitian pendalaman Tahun 2018 dibuat oleh tim peneliti dan bertanggung jawab kepada Bidang Kajian dan Penelitian FKPT Propinsi Maluku Utara.

2. **Policy Brief Pemberdayaan Masyarakat**

Policy brief pemberdayaan masyarakat berbasis daya tangkal, yang alternatif program-programnya rasional untuk dilaksanakan oleh bidang-bidang di FKPT Propinsi Maluku Utara pada Tahun 2019, berdasarkan ketersediaan anggaran, kewenangan, dan perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian, NGO dan organisasi kemasyarakatan lainnya di Propinsi Maluku Utara.

BAB V

RINCIAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Biaya yang digunakan untuk penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (terbilang: *Tujuh puluh juta rupiah*) yang kesemuanya didanai oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Adapun rincian penggunaan dana penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan	Sub Total
	Honorarium:			
1.	Ketua Tim Peneliti	1 Orang	5.000.000.	5.000.000.
2.	Anggota Tim Peneliti	4 Orang	4.000.000.	16.000.000.
				21.000.000.
	Belanja Jasa:			
3.	Penyusunan Policy Brief	1 Set	3.500.000	3.500.000
	Pengumpulan Data dan Penyusunan Materi	1 Set	5.000.000	5.000.000
				8.500.000.
	Peralatan Penunjang:			
4.	Portable Sony Voive Recorder	2 Unit	2.000.000	4.000.000
5.	ATK	1 Set	5.000.000	5.000.000
6.	Fotocopy Bahan Penelitian	1 Set	2.500.000	2.500.000
7.	Pembelian Tinta Printer Laser Jet	2 Unit	750.000	1.500.000
				13.000.000.
	Biaya Perjalanan dan Akomodasi:			
8.	Kota Ternate	PP	2.000.000	2.000.000
9.	Kabupaten Halmahera Utara	PP	5.000.000	5.000.000
10.	Kabupaten Pulau Morotai	PP	5.000.000	5.000.000
11.	Kabupaten Halmahera Selatan	PP	5.000.000	5.000.000
				17.000.000.
	Seminar dan Publikasi:			
12.	Seminar	1 Set	8.000.000	8.000.000
13.	Publikasi	1 Set	2.500.000	2.500.000
				10.500.000.
	TOTAL			70.000.000

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Maluku Utara

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana yang datang tiba-tiba. Jika budaya dan kearifan lokal itu dapat terpelihara dengan baik, maka radikalisme dan terorisme dapat dihindari dan ditekan sekecil mungkin. Penulis berpendapat, kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal (Efrizal Lubis, 2016). Tata kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dipengaruhi oleh kearifan lokal wilayah masing-masing, setidaknya budaya gotong royong dan saling mengingatkan antar masyarakat masih hidup hingga saat ini, bahkan masyarakat di era modern seperti sekarang ini masih ada yang

melakukan ritual-ritual baik itu keagamaan maupun adat istiadat dari leluhur yang mereka yakini.

Kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan dan lokal (*loca*) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan

diwujudkan sebagai tradisi (Efrizal Lubis, 2016). Potensi alam dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat guna membantu kelangsungan taraf hidupnya.

Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat mencakup kearifan masa kini dan karena itu pula lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional. Dengan kata lain, jika seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan aparat hukum menggunakan kearifan lokal sebagai upaya untuk menangkal terorisme dan radikalisme, diyakini ini akan menjadi jurus ampuhnya. Maka dari itu, kita berharap kepada pemerintah untuk respon terhadap kearifan lokal ini. Lindungi dan perkuatlah sistem kearifan lokal, sehingga bisa dijadikan sebagai senjata untuk menangkal 'serangan' terorisme

dan radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Efrizal Lubis, 2016). Hal ini sangat perlu diperhatikan mengingat kondisi saat ini yang serba keterbukaan mewajibkan kita untuk lebih waspada menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman lingkungan dari ancaman radikalisme baik dari dalam maupun dari luar lingkungan.

Berikut implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan; dan Kota Ternate.

Saat ini kearifan lokal *hibualamo* tidak lagi dijadikan sebagai basis dalam penyelesaian konflik. Kepemimpinan saat ini lebih langsung menyentuh atau turun langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah juga sering melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengali informasi yang terkait dengan radikalisme. Pada prinsip masyarakat Halmahera Utara sudah sangat sadar dan menyadari bahwa konflik itu sangat membuat masyarakat sengsara. Saat ini hubungan kekerabatan masyarakat Halmahera Utara semakin erat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan didukung juga dengan peran-peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang cukup bagus dalam menangani masalah-masalah konflik maupun isu-isu yang terkait dengan radikalisme maupun yang mengarah pada terorisme. Masyarakat Halmahera Utara adalah masyarakat

yang kehidupan sudah sangat sejahtera. Sehingga tidak berpengaruh dengan iming-iming atau ajakan dari orang lain untuk membuat tindakan yang merugikan orang lain dan keluarga dengan imbalan kesejahteraan. Toleransi masyarakat Halmahera Utara cukup bagus, hal ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dua komunitas dan orang Islam dan Kristen sama-sama terlibat dalam kegiatan tersebut (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Samsudin Rasyid / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Daya tangkal masyarakat halmahera Utara sangat kuat, ada satu dua orang sering melakukan tindakan potensi radikalisme, tetapi kami kepolisian selalu menghimbau digereja dan mesjid dan kepada kelompok anak muda untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada radikalisme. Upaya-upaya yang kami lakukan sangat menyentuh. Ada beberapa orang, bersifat simpatisan tetapi karena masyarakat cerdas dalam bertindak dan langsung melaporkan, kami pun langsung turun mengankam orang tersebut. Dan kepada anak-anak muda kami sering melakukan himbabuan kepada masyarakat yang menggunakan miras dan Narkoba, agar menghentikan perbuatannya. Toleransi Masyarakat Halmahera Utara saat ini sangat aman dan nyaman. Kami juga selalu melakukan kordinasi dengan pemerintah dalam mencegah radikalisme. Setiap ada masalah dimasyarakat kami selalu turun dan bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita di daerah Halmahera Utara ada sebagian kecil, yang memiliki pemikiran keras. Dan kami datangi langsung kepada yang bersangkutan yang memiliki pemikiran radikalisme. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Saat ini Halmahera Utara tingkat

perkuliahan antara kampung juga sangat turun dratis (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Irvan Indarta / Kepala Polisi Resort Halmahera Utara).

Terorisme saat ini di Halmahera Utara itu tidak ada sama sekali. Kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa terorisme itu tindakan yang keliru. Oleh agama apapun tidak menghalkan. Karena semua agama mengajarkan kita tentang kedamaian, tidak saling membunuh antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Budaya kita sangat tidak mengajarkan kekerasan. Persaudaraan kakak beradik antar Islam yang satu dengan Kristen sangat menyangi. Tatanan adat istiadat masyarakat Halmahera Utara sangat erat hubungannya. Budaya memiliki potensi sangat besar dalam menyelesaikan masalah-masalah radikalisme yang mengarah pada potensi konflik. Toleransi masyarakat Halmahera Utara saat ini sangat aman dan nyaman dalam hidup berdampingan antara dua komunitas umat beragama antara Islam dan kristen (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Roke Saway / Tokoh Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara).

Adat berada di komunitas masyarakat, walaupun ada sekat-sekat kecil dalam masyarakat lewat kearifan lokal yang berada di masyarakat dapat terselesaikan. Adat sebagai perekat sosial dalam masyarakat. Pengalaman konflik horizontal bisa terselesaikan dengan pendekatan adat. Saat ini simbol-simbol adat sudah mulai hilang tetapi nilai-nilai kearifaln lokal hidup dimasyarakat. Saat ini perhatian pemerintah terhadap pengembangan adat atau kearifan lokal semakin hilang. Oleh karena itu pemerintah sudah harus berpikir kembali untuk membangun kembali *hibualamo* sebagai benteng dalam

menghindari paham-paham radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Jesaya Banari / Tokoh Adat Kabupaten Halmahera Utara).

Hubungan masyarakat antara Islam dan Kristen saat ini kehidupannya sangat nyaman. Karena kami MUI selalu melakukan pembinaan terhadap umat agar jangan terpengaruhi oleh hal-hal yang mengarah pada radikalisme maupun teroris. Karena hal ini sangat merusak tatanan kehidupan beragama di Halmahera Utara. Dan teroris itu adalah musuh kita bersama yang harus dilawan. Karena teroris itu kejahatan kemanusiaan. Halmahera Utara saat ini tidak ada paham radikalisasi, karena kami selalu memberikan pencerahan dan pembinaan kepada umat Islam yang memiliki paham radikal. Memang ada satu dua orang saja tetapi itu tidak terkait dengan kelompok (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Hi Jaksa Samaun / Tokoh MUI Kabupaten Halmahera Utara).

Sejauh ini kami dari sinode selalu memberikan pengarahan dan himbauan kepada jemaat kami terkait dengan paham radikalisme/terorisme, karena terorisme itu merupakan kehajatan nilai-nilai kemanusiaan. Kerinduan umat yang ada di Halmahera Utara sangat besar untuk hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Walaupun ada bom di Surabaya, umat di Halmahera Utara tidak terpengaruh, maupun ada kejadian-kejadian yang mengarah pada deradikalisasi maupun sampai pada tingkat terorisme. Khususnya kami di nasrani selalu melakukan penguatan-penguatan kepada jemaat-jemaat kami. Toleransi khususnya di Halmahera Utara saat ini sangat nyaman dan aman, contoh sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang membuat nilai-nilai toleransi itu retak. Tragedi di Surabaya kami cepat bertindak dengan melakukan

pengecahan dengan membuat surat edaran kepada gereja-gereja bahwa kejadian di Surabaya adalah masalah kemanusiaan bukan masalah agama. Secara umum tokoh-tokoh agama di halmahera utara sudah sangat cukup bagus dalam memahami konflik yang mengarah pada pemikiran-pemikiran radikalisis. Sehingga mereka bisa memberikan pemahaman kepada masing-masing jemaat untuk menghindari pemikiran radikalisis tersebut. Sekarang ini ada tokoh-tokoh adat sudah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat, karena ada dominasi kepentingan kelompok dalam menjalankan nilai-nilai adat untuk kepentingan sesaat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Verdianus Guselaw, M. Toel / Pendeta Sinodhe, Kabupaten Halmahera Utara).

Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan sangat menghormati pihak kesultanan, sultan adalah tokoh utama dalam meredam kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan tindakan radikal. Sanksi adat juga masih berlaku di beberapa masyarakat Bacan, karena kekuatan adat menjadi akar bagi kehidupan masyarakat dalam mengarungi perkembangan zaman yang terus berubah. Kesultanan Bacan melibatkan semua pihak seperti perangkat adat, FKUB, tokoh agama dan lain-lain dalam berdialog terkait dengan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan masyarakat. Setiap ada konflik diselesaikan dengan cara yang baik, seperti konflik batas wilayah yang pernah terjadi di masyarakat adat, pemerintah daerah sudah turun tangan untuk menengahi namun konflik tersebut terus terjadi berlarut-larut, setelah pihak kesultanan dilibatkan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut akhirnya konflik tersebutpun selesai dan aman hingga saat ini. Itulah sebagian bukti bagaimana

kuatnya masyarakat menghormati pihak kesultanan. Kesultanan memiliki perangkat di wilayah-wilayah, perangkat tersebut dikenal dengan perangkat adat, jadi tidak semua konflik langsung di laporkan kepada pihak kesultanan. Berdasarkan hal tersebut, kearifan lokal di Kabupaten Halmahera Selatan masih terjaga dengan baik dan masih efektif di tengah-tengah masyarakat dalam meredam berbagai macam konflik, seperti konflik agama, konflik sosial, konflik wilayah, dan konflik-konflik lainnya (Hasil Wawancara tim peneliti dengan pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Adat merupakan perekat bagi masyarakat, oleh karena itu perlu dijaga dengan baik, arus perkembangan memang tidak dapat dibendung namun jangan lupakan bahwa masyarakat memiliki adat-istiadat yang dipraktikkan secara turun-temurun. Hal ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah, walaupun saat ini adalah eranya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah menjadi wakil pemerintah pusat di daerah namun pada kenyataannya pemerintah daerah tidak dapat meredam atau menyelesaikan konflik secara total, dan telah terbukti bahwa konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dapat terselesaikan secara maksimal oleh pihak kesultanan. Sehingga dengan demikian, sudah seharusnya pihak pemerintah daerah juga tetap melibatkan dan menaruh perhatian kepada pihak kesultanan dan perangkat adat yang ada. "Jangan sekali-kali melupakan sejarah", karena Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masih tetap teguh mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat

(Hasil Wawancara tim peneliti dengan pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Terjadi konflik politik di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan, karena ketidaksukaan beberapa masyarakat terhadap calon kepala desa yang terpilih akhirnya masyarakat berpindah wilayah. Bermuncuran aliran-aliran di dalam keagamaan di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan, namun kami tetap menjaga silaturahmi dengan baik, kami saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, sehingga tidak terjadi konflik yang berlarut-larut. Kami selaku tokoh agama selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk menghimbau bahwa walaupun kita berbeda pilihan namun kita adalah bersaudara, jangan sampai terjadi perpecahan. Kunci untuk menyelesaikan konflik dari setiap persoalan yang terjadi adalah komunikasi yang baik, sistem kekeluargaan karena kita semua bersaudara, kearifan lokal harus kita tetap jaga dan hormati dengan baik. Kearifan lokal menjadi daya tangkal bagi setiap persoalan utamanya persoalan yang terjadi antara kelompok yang berbeda suku, perbedaan itulah tetap dapat direkatkan karena adanya kearifan lokal yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat adat, dan pemerintah daerah seperti Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh Keagamaan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme sangat dibutuhkan, pihak pemerintah daerah, aparat keamanan (kepolisian), perangkat adat, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat menjadi pihak-pihak penengah dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya lihat sejauh ini, setiap konflik akan selesai dengan damai karena tokoh agama dan tokoh adat (pihak kesultanan) masing-masing berupaya menjadi penengah dan saling berkoordinasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, seperti konflik pemuda di Desa Labuha, konflik tersebut selesai dan aman hingga saat ini. Konflik yang terjadi antara masyarakat Taman Sari dan pihak kepolisian juga diselesaikan dengan cara adat (Kearifan Lokal), sehingga memang kearifan lokal menjadi daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal yang ada menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik, toleransi hidup harus terbentuk dalam jiwa masyarakat, semboyan bahwa kita adalah berdaudara harus tetap diingat dan dijaga sampai ke generasi-generasi selanjutnya (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan).

Hampir seluruh bentuk kearifan lokal Kesultanan Tidore yang wilayah kesultanan meliputi Tidore, sebagian Halmahera (Maluku Utara), Negeri 3 Kota Ambon, dan Seram Selatan (Maluku) senantiasa berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme. Setiap saat orang yang datang ke kedaton, selaku Sultan Tidore, saya selalu menylipkan pesan-pesan tentang kehidupan orang Tidore dan Moloku Kieraha dalam menjaga tradisinya bukan hanya satu atau 10 sampai 20 tahun melainkan sudah berumur ribuan tahun. Tradisi itu tidak lain adalah nilai-nilai persaudaraan dan menghayati sikap hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang sudah tentu di dalamnya menangkai

radikalisme. Karena itu, jangankan radikalisme, terorisme tidak pernah tumbuh di negeri ini. Pencegahan radikalisme dan terorisme itu tidak saja menggunakan teori-teori modern namun bisa digali dari nilai-nilai kearifan lokal. Selain dalam bentuk petuah kepada masyarakat adat maupun siapa saja yang datang ke kedaton, pada momen Hari Jadi Tidore, semua elemen masyarakat adat Tidore bersilaturahmi. Momen silaturahmi ini selalu diisi dengan pesan-pesan untuk menjaga solidaritas, silaturahmi dalam kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga kegiatan Festival Nuku yang menghimpun semua elemen generasi muda dari berbagai tingkatan pendidikan, strata sosial dan sebagainya. Di momen ini, pihak Kesultanan memberikan pencerahan terutama melihat Nuku sebagai simbol perekat dan penguatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga semangat patriotisme dalam menjaga NKRI, dan figur Nuku menjadi cermin dan idola kaum muda. Dalam dimensi ini, sudah *include* upaya pencegahan radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan H. Husein Sjah / Sultan Tidore, Kota Tidore Kepulauan).

Kegiatan-kegiatan yang bersifat forum dalam rangkaian dengan Hari Jadi Tidore, misal atau Festival Nuku dan berbagai kegiatan budaya lainnya selalu mendapat dukungan kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia. Juga ada kegiatan kunjungan untuk pembinaan di wilayah Kesultanan Tidore seperti di Geser, Gorom, Saparua, Sirisori Islam, Sirisori Kristen. Di forum itu, kami bertukar pikiran dengan masyarakat adat setempat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Fakta menunjukkan di wilayah Kesultanan Tidore maupun Moloku

Kieraha tidak pernah tumbuh kelompok radikalisme sebagai wujud menjaga nilai-nilai tradisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya, berbagai forum yang dilaksanakan Kesultanan bukan karena ada terorisme namun sudah merupakan bagian dari kearifan lokal. Kita bangsa Indonesia harus menginstropeksi diri, kenapa muncul terorisme? Apakah ini kesalahan masyarakat atautkah negara yang tidak beres mengurus masyarakatnya? Negara juga harus melakukan pembenahan ke dalam, melalui pelayanan yang baik, para negarawan hendaknya memberikan contoh yang baik, jangan bicaranya berbeda dengan sikap dan perilaku (Hasil Wawancara tim peneliti dengan H. Husein Sjah / Sultan Tidore, Kota Tidore Kepulauan).

Pada prinsipnya secara eksplisit tidak ada seksi atau badan di FKUB. Namun secara implisit, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang pengurusnya terdiri dari para pimpinan umat dari agama Islam, Protestan, dan Katolik di wilayah Kota Tidore Kepulauan sudah merupakan wahana perekat solidaritas antarmasyarakat sehingga dapat menangkal konflik sosial. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tidore Kepulauan secara khusus memiliki lembaga terkait hal tersebut. Nama lembaganya Komisi Pembinaan Antar Umat Beragama yang langsung di bawah Ketua MUI. Komisi ini terdiri dari beberapa anggota. Di antara program yang sudah dijalankan adalah: menjalin koordinasi dan kerjasama melalui forum dengan fokus pembahasan tentang kerukunan antarumat beragama internal umat beragama, antarumat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Kegiatannya berbentuk pertemuan rutin untuk membahas setiap gejala baik

skala internasional maupun nasional, dengan sasaran mengantisipasi agar gejala itu tidak merambah ke Maluku Utara umumnya dan Kota Tidore khususnya. Sedangkan melalui FKUB diagendakan pertemuan rutin triwulan yang diselenggarakan secara bergilir di wilayah luar kota, termasuk di daerah mayoritas non muslim. Tujuannya untuk menangkal radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Pihak MUI, Kota Tidore Kepulauan).

Juga sosialisasi setiap pemimpin agama melalui kegiatan ibadah masing-masing yang intinya menyampaikan pesan-pesan agar masyarakat tidak terpancing dengan isu serta gejala yang melanda dunia maupun bangsa Indonesia. Baik melalui kegiatan MUI maupun FKUB, berbagai kegiatan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi terkait terutama Badan Kesbangpol Kota Tidore. FKUB Kota Tidore juga melalui fasilitas Pemkot Tidore diikutsertakan dalam studi banding ke Kota Manado sebagai daerah percontohan kerukunan antarumat beragama. Kami menyadari, berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan tentu perlu terus ditingkatkan baik volume maupun jangkauan masyarakat. Itu sebabnya, ke depan kami juga perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti FKPT dan BNPT terutama untuk mendapatkan akses narasumber dan optimalisasi anggaran yang sangat terbatas. Sampai saat ini tidak ada konflik sosial atau kejadian-kejadian yang menyerempat ke masalah SARA (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Pihak MUI, Kota Tidore Kepulauan).

Terdapat bidang dalam organisasi pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang khusus menangani daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, yakni

Bidang Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin seorang Kepala Bidang eselon III B. Program-program yang sudah dijalankan ialah (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Walid Muhammad / Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan):

1. Pembinaan Ormas-ormas, LSM, dan Forum-roum yang ada di Tikep untuk mencegah apabila terjadi gesekan atau konflik kecil agar tidak menjadi besar, misalnya perkelahian antarkampung. Kami melalui kerjasama dengan instansi terkait melakukan upaya melokalisir setiap kejadian agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang lebih besar dan menimbulkan aksi kekerasan lainnya.
2. Dialog Penguatan Nilai-nilai Pancasila dengan Tema Pencegahan Radikalisme dan Aliran Sesat
3. Rakor Penanganan Konflik Sosial
4. Pembentukan Forum Koordinasi antar Umat Beragama (FKUB)
5. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
6. Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah
7. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
8. Pembentukan tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pada 2018, kami telah memprogramkan Tablig Akbar dengan menghadirkan testimoni dari mantan pelaku terorisme sehingga generasi muda, khususnya biosa leib memahami apa sesungguhnya motif di balik terorisme itu. Namun program ini belum bisa dilaksanakan karena terkendala anggaran (Hasil

Wawancara tim peneliti dengan Walid Muhammad / Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan).

Terdapat unit dalam organisasi Polres Tidore Kepulauan yang khusus menangani daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Unit tersebut bernama Unit Diteksi Kermanan Negara yang berada di bawah Satuan Intelijen di Polres Tidore Kepulauan. Program Polres melalui unit tersebut yang sudah dijalankan terkait daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme ialah (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Dwi Gastimur Wanto / Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Tidore Kepulauan):

1. Sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai forum maupun acara-acara ormas
2. Deteksi ke wilayah-wilayah terhadap kelompok terindikasi
3. Penggalangan melalui Satgas Nusantara melaksanakan khotbah baik anggota polri maupun masyarakat, pembuatan video anti hoax untuk diviralkan melalui media sosial dan lain-lain.

Terdapat beberapa program yang bersifat tupoksi Polres seperti deteksi dan lain-lain dilakukan secara internal lembaga. Sedangkan program sosialisasi melalui forum dan kegiatan masyarakat biasanya melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Tidore, Ormas dan LSM. Adapun indikator keberhasilan program daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang sudah dijalankan adalah (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Dwi Gastimur Wanto / Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Tidore Kepulauan):

1. Masyarakat mulai memahami teroris dan apa motif sesungguhnya dan bisa menilai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh radikalisme dan terorisme
2. Masyarakat mampu memfilter berbagai informasi yang cenderung provokasi dengan kepentingan agama dsb sehingga dapat menetralsir informasi itu melalui keluarga, lingkungan hingga masyarakat umum lainnya. Hal itu tampak dalam dinamika para netizen (pengguna sosial media) di Kota Tidore yang selalu menangkal informasi-informasi menyesatkan.

Paham radikal tidak terlihat karena memang Tidore secara sosiologi merupakan masyarakat homogen serta nilai-nilai adat budaya masih sangat kuat. Malam hari, usai shalat Magrib jalanan sepi. Orang lebih banyak memilih berkumpul dengan keluarga. Yang kita antisipasi adalah anak muda yang merantau dan balik karena dikhawatirkan terkontaminasi dengan paham-paham yang salah. Dalam konteks bagaimana menciptakan daya tangkal, Kaplores selalu menggandeng pemuda kampung melakukan sosialisasi soal narkoba, miras serta dan radikalisme. Di sisi lain, di setiap kampung ada remaja masjid yang intens melaksanakan kegiatan religius. Terkait dengan aktifitas sosial kemasyarakatan yang menjadi perekat toleransi, Pemuda Tomolu misalnya, gerakan sadar narkoba yang di-SK dan dilantik BNN. Persoalan penyakit sosial kaum muda seperti miras, obat-obatan dan narkoba sesungguhnya dapat memicu kekerasan. Kekerasan yang cenderung memunculkan sikap radikal. Untuk mencegahnya, kami membuat wadah kaum muda menyalurkan minat

dan bakat di bidang literasi dan olahraga. Sementara untuk Garda Nuku, lebih dominan bergerak di bidang kebudayaan dengan mendirikan sanggar seni. Pada prinsipnya, sastra merupakan bagianb dari memperhalus budi pekerti sehingga dengan berbagai kegiatan seni dan sastra itu, karakter kaum muda bisa dibentuk (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan / Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemuda Kampung dan Garda Nuku dalam membentuk karakter kaum muda, kami bentuk Sekolah Pesisir yang setiap minggu sekali mengajarkan anak-anak tentang literasi, *public speaking* dan diselingi dengan kegiatan sepak bola melalui wadah SSB di beberapa kelurahan. Sedangkan Garda Nuku bergerak di bidang seni dan kebudayaan. Menghimpun komunitas anak muda mendirikan sanggar seni musik, kerajinan dan lain-lain untuk budaya. Kegiatan pelatihan dilakukan setiap hari minggu. Sedangkan untuk menguji kemampuan mereka, anak-anak selalu dikutsertakan dalam berbagai lomba baik yang dilaksanakan Dinas Pendidikan maupun lomba yang dilaksanakan organisasi pada setiap Fetival Nuku, maupun momen Ramadan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan / Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Situasi di Kabupaten Halmahera Barat sampai saat ini dalam keadaan aman. Namun demikian, radikalisme tidak dapat kita prediksi secara tepat, sehingga sebagai tokoh masyarakat kami harus selalu waspada. Adapun cara yang kami lakukan adalah mendeteksi setiap pendatang baru dengan mendatanya sehingga kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat

agar selalu melaporkan tamu yang datang 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam ke aparat desa setempat. Kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan diantara masyarakat Kabupaten Halmahera Barat. Terkait dengan kearifan lokal yang ada, kami di Kecamatan Sahu sangat memegang teguh adat-istiadat secara turun-temurun seperti menghargai tamu, berlaku sopan dan santun sesama warga, dan saling menghormati antar satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan status sosial (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Roy Edwin Tjey / Tokoh Masyarakat Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat).

Pencegahan radikalisme di Kabupaten Halmahera Barat secara kearifan lokal bersandar pada adat *seatorang* sangat jelas karena prinsip dari pihak kesultanan agama dan adat dalam rangka ini untuk mencegah radikalisme. Pihak kesultanan selalu berpegang pada Adat *Matoto Agama*, Agama Matoto kitabullah jadi agama dan adat berbarengan dalam rangka untuk mencegah dan menangkal baik isu-isu yang bersifat negatif mengenai masalah terorisme yang dapat membelah persatuan dan kesatuan terutama masalah teroris (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus / Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Pada dasarnya, paham radikalisme itu sangat bertentangan dengan jati diri orang Maluku Utara, mengapa demikian, karena Maluku Utara ini bertumbuh besar dengan semangat adat, aturan dan budaya yang merupakan salah satu kearifan lokal yang masih ada sampai hari ini. Saya juga pernah pada

tahun 2017 di minta untuk kegiatan festival adat se-nusantara, saya juga turut mengali nilai-nilai adat dan budaya yang didalamnya itu, ada nilai 5 yang terkandung dalam adat dan budaya yaitu nilai spiritualitas, ekonomi, sosial, nilai estetika dan nilai budaya. Dari kelima nilai ini sesungguhnya yang membentuk karakteristik masyarakat Maluku Utara, artinya kalau berbicara religius identitas identik dengan orang Maluku, berbicara tentang soal ekonomi itu identik dengan orang Maluku Utara, dan semua tergambar dalam rumah adat istiadat sebagai salah satu kearifan lokal. Namun saya harus katakan secara objektif, bahwa kearifan lokal ini sudah mulai terkikis oleh bangsa, dengan terkikisnya itu maka masyarakat juga sudah mulai kehilangan identitasnya, sebagai anak bangsa saya ambil contoh kasus keluarga saya itu sebagian di Kristen dan sebagian di Islam, ada pertanyaan bahwa "siapa itu adik kandung saya? lo bapak pendeta kenapa dia muslim? pertanyaan kemudian kenapa pak pendeta punya adik dia muslim?" apa itu perlu dipertentangkan? padahal saya hidup besar dalam simbool nilai-nilai kearifan lokal adat dan budaya Maluku Utara (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ausalmoon Raffane / Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Berdasarkan kearifan lokal dalam konteks pemerintah daerah itu biasanya dimunculkan dalam sebuah program, seperti kerja bakti yang dilibatkan para tokoh-tokoh lintas agama baik di mesjid dan gereja, kelembagaan lokal yang ada perlu di efektifkan kembali (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Syarif Ali / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat). Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat selalu memegang teguh adat dan

agama sebagai salah satu kearifan lokal yang tumbuh dan secara turun-temurun diwariskan oleh para leluhur (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Rudi S. Hadi / Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).

Paham-paham radikalisme secara organisasi yang ideologinya (ideologi khilafah) yang bertentangan dengan Ideologi Negara adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun demikian karena sudah dibubarkan oleh negara maka secara organisasi tidak lagi melakukan aktifitasnya. Yang masih perlu diikuti dan diwaspadai adalah karena orang-orangnya/mantan pengurus sebagian besar terdiri dari para intelektual baik dari kalangan kampus maupun birokrasi (terpelajar). Terbukti pada beberapa bulan yang lalu, pernah menyebarkan selebaran di beberapa mesjid. Selain HTI, organisasi yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah munculnya beberapa aliran/faham keagamaan pada beberapa waktu yang lalu seperti Gafatar dan aliran Syiah Jafariah namun sudah ditangani oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama termasuk dari pihak Kesultanan sehingga aktifitasnya tidak muncul lagi. Namun demikian sampai sejauh ini belum ditemukan tindakan dalam bentuk kekerasan di tengah masyarakat. Yang sering muncul adalah ungkapan-ungkapan yang bernada tuduhan/sedikit keras yakni pada saat-saat tertentu misalnya pada saat berorasi/demonstrasi atas ketidakpuasan terhadap kebijakan/peran pemerintah. Selain organisasi Radikal yang disebut diatas, yang perlu dan senantiasa diwaspadai adalah potensi ancaman yang berkaitan dengan jaringan teroris yang datang dari luar karena kondisi geografis Maluku Utara yang memiliki banyak pintu masuk atau dijadikan tempat persembunyian

atau pelatihan. Namun sejauh ini faham tentang terorisme maupun tindakannya khususnya dalam masyarakat kota Ternate dapat dikatakan tidak ada. Implikasi Marawi Philipina Selatan, sejauh ini belum nampak secara menonjol baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Perbincangan public tentang konflik Marawi hampir tidak ada, sementara pembahasannya hanya sebatas dikalangan aparat keamanan / intelejen (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate).

Sampai sejauh ini gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan ekstrim secara Organisasi dapat dikatakan tidak ada. Hanya pada saat-saat tertentu oleh pribadi-pribadi dalam hal ini oleh anak-anak pelajar/mahasiswa misalnya melalui orasi/demo tentang Kebijakan Pemerintah, Tuntutan Hukum atau keputusan Hukum yang dirasakan belum tepat dan lain-lain. MUI mengakui bahwa peran tokoh Agama sangat strategis dalam mencegah faham Radikalisme dan terorisme terutama faham/aliran agama yang dinilai sesat. Selama ini MUI telah dan senantiasa menda'wakan (metodologi dakwah) yang mengajak dengan hikmah, bijaksana dan mengajarkan kebaikan sesuai ajaran agama (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Usman Muhammad / Ketua MUI Kota Ternate).

Pada dasarnya sama, mengakui adanya organisasi berfaham radikalisme dan adanya faham/aliran agama termasuk kekuatiran terhadap jaringan terorisme sebagaimana diangkat oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate tersebut diatas. Selama ini dapat dikatakan tidak pernah ada keterlibatan masyarakat adat khususnya di kota Ternate terhadap faham-faham

radikal dan terorisme. Almarhum Sultan Mudaffar Syah, senantiasa mengingatkan dan mengajarkan bahwa "Diantara Sultan pernah dibunuh oleh Penjajah karena bersama para Leluhur negeri ini, Bala Kusu se Kano-kano (rakyat) berjuang mengusir penjajah demi NKRI sebelum kita sadar akan kemerdekaan". Oleh karena itu Kesultanan dan masyarakat adat tidak boleh berbuat sesuatu yang akan menciderai NKRI. Kesultanan Negri Moloku le Raha dan Adat-Istiadatnya tetap ada dalam NKRI dan tetap menjaga demi teguh dan tegaknya NKRI. Sebagai symbol keseharian adalah tetap berkibarnya sangsaka merah putih di dalam Keraton Kesultanan Ternate yang diapit oleh bendera raja dan bendera kesultanan. Barang siapa sebagai masyarakat adat berbuat yang dinilai menciderai kesatuan dan persatuan dalam NKRI berarti dia bukan masyarakat adat dan ingin merusak marwah kesultanan sendiri (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ridwan Dero / Kalem Kesultanan Ternate).

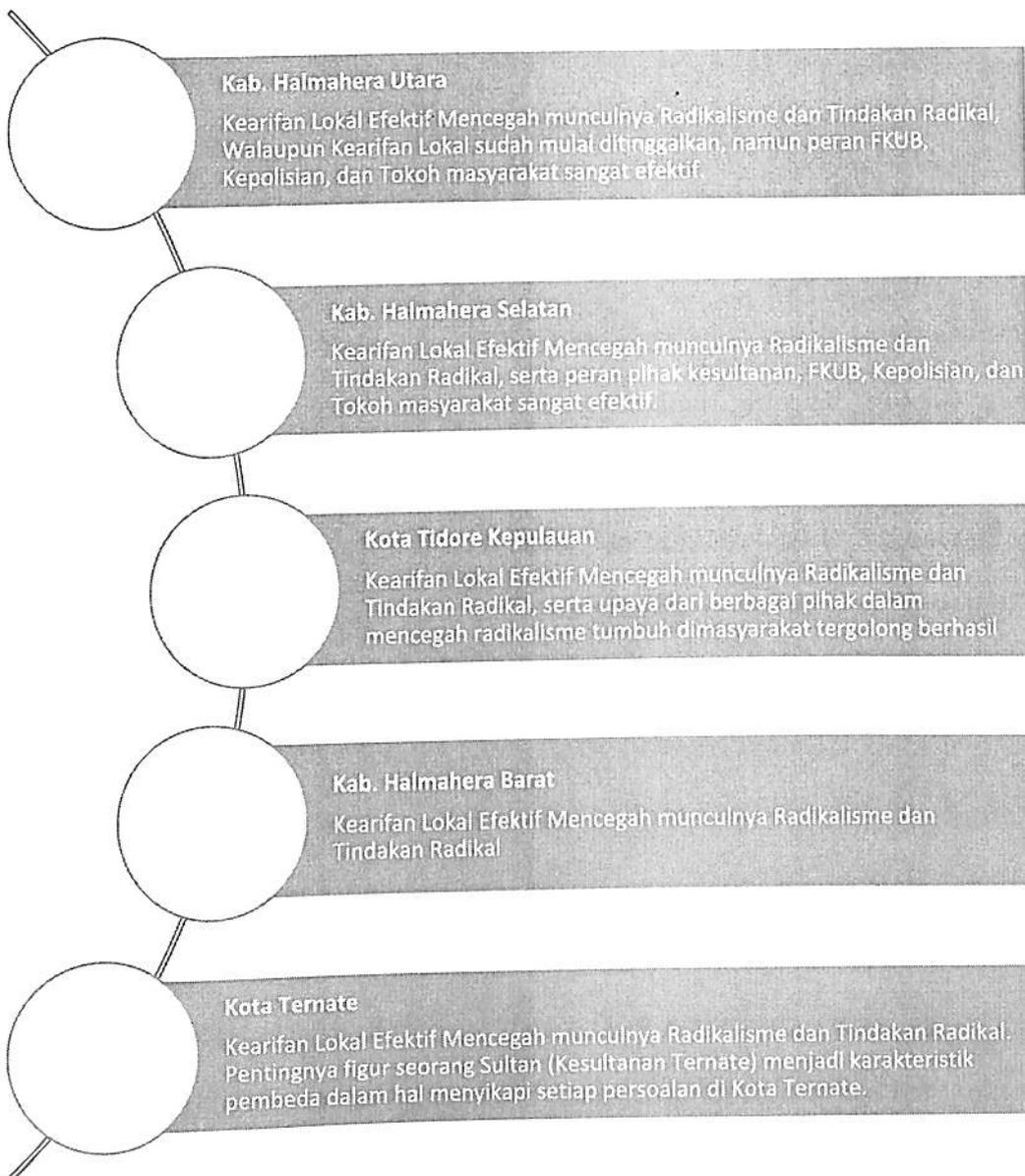
Jauh sebelum *Bhinneka Tunggal Ika*, masyarakat adat *Maloku Kie Raha* sudah mengakui adanya perbedaan namun senantiasa memelihara kebersamaan dalam keaneka ragaman. Pengakuan ini hidup sebagai kearifan lokal dalam pergaulan bermasyarakat. Walaupun terkesan samar namun Lembaga Kesultanan dalam kehidupan Adat-Istiadatnya dengan memelihara kearifan local, secara moral cukup berperan dalam membingkai masyarakat dari pengaruh atau provokasi Radikalisme dan Terorisme. Disamping ketaatannya kepada *figure* seorang Sultan, sesungguhnya nilai-nilai kearifan yang dipelihara, memiliki makna yang sarat edukasi sebagai pembelajaran

moral dalam interaksi internal masyarakat adat untuk menghindari faham-faham radikal dan terorisme dan sebaliknya tetap memelihara kohesi sosial dan menjaga kesatuan NKRI. Pengalaman dari kejadian konflik horizontal telah membangkitkan satu kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak menghendaki kejadian seperti itu terulang kembali. Suatu catatan yang perlu diperhatikan adalah terjadinya konflik tersebut karena isu dan mengusung bendera agama. Pengalaman kelim tersebut menjadi memori kehidupan dalam Kehidupan Kesultanan dengan Adat-Istiadat untuk kembali menjaga dan menguatkan kohesi social dalam keaneka ragaman karena Kesultanan Moloku Kie Raha dengan ajaran kearifan penuh makna yang sejak awal sudah mengakui dan menghargai perbedaan sebagai sebuah rahmat dalam kehidupan. Hal ini perlu dijaga agar masyarakat dan lingkungan masing-masing tetap terjaga dari provokasi dengan mengatas namakan agama (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ridwan Dero / Kalem Kesultanan Ternate).

Menurut Mas'ud Subarjo (Tokoh Masyarakat di Kota Ternate perbuatan secara radikal baik secara-pribadi-pribadi maupun secara organisasi boleh dikatakan tidak pernah terjadi dalam kota Ternate. Demikian pula perbuatan/aksi Terorisme. Yang pernah didengar adalah adanya faham-faham keagamaan tetapi sukurlah semuanya itu sudah dapat dicegah/dilarang oleh Pemerintah sehingga sampai sekarang sepertinya tidak terdengar lagi. Patut diakui bahwa walaupun masyarakat tidak berperan secara langsung/pasif dalam mencegah faham Radikalisme dan Terorisme namun adanya media informasi yang terbuka maka menjadi pelajaran pula bagi anggota masyarakat

yang secara pribadi ada pendirian dan kehati-hatian terhadap paham Radikalisme dan terorisme termasuk paham-paham keagamaan yang sesat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipetakan implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara sebagai berikut:



Ada beberapa ciri radikalisme yang terjadi sekarang ini. Pertama adalah sifatnya yang acak dan global. Mark Juergensmeyer (2000), misalnya, berpendapat ada arah baru radikalisme dan juga kekerasan kini dibanding masa lalu, katakanlah sebelum globalisasi benar-benar menjadi mewabah seperti sekarang ini. Yaitu, bahwa dimasa lalu, radikalisme dan kekerasan termasuk yang bersumber dari keyakinan agama, lebih mudah diidentifikasi kelompok maupun locusnya. Yaitu mereka umumnya berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang tersisih dari mainstream kekuasaan atau akibat marjinalisasi. Di samping itu, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari mereka yang menuntut wilayah tertentu untuk tidak bergabung atau ingin memisahkan diri dari negara tertentu dengan berbagai sebab atau separatis. Dengan demikian kelompok-kelompok tersebut dengan mudah bisa diidentifikasi dan diantisipasi. Namun, radikalisme dan kekerasan keagamaan kini, cenderung tidak mudah diidentifikasi dan tidak terpusat di tempat-tempat tertentu serta tidak mudah pula diidentifikasi sebab-sebabnya. Ia bisa terjadi bersifat acak baik locus maupun aktor-aktornya. Mereka bisa berasal dari kalangan yang secara ekonomi kaya dan berpendidikan tinggi serta memiliki pemahaman agama yang memadai atau bahkan dari kalangan yang berlatar belakang pendidikan agama. Radikalisme juga bisa menjadi bagian dari kemajuan teknologi informasi itu sendiri yang bersifat masif dan karenanya tidak mudah dideteksi (Ahmad Suaedy, 2015). Oleh karenanya, upaya mencegah radikalisme di masyarakat harus perlu diupayakan secara sistematis, masif, dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dan polemik bagi

rakyat Indonesia secara meluas. Karena jangan sampai upaya yang dilakukan adalah baik secara tujuan namun salah dalam proses.

Radikalisme semacam itu tidak hanya terjadi di kalangan Islam melainkan juga di kalangan agama lain seperti terjadi pada Partai Hindu beraliran kanan BJP (*The Bharatiya Janata Party*) atau *Indian People's Party* yang di dalamnya terdapat unsur-unsur radikal dan fanatik dalam Hindu di India, serta keterlibatan sebagian kalangan Bikhu atau Monks Buddhis atas serangan terhadap Rohingya di Myanmar. Hal yang sama terjadi pada kalangan fundamentalisme Kristen yang sering melakukan kristenisasi secara agresif dinegara-negara berkembang namun berasal dari negara-negara maju (Ahmad Suaedy, 2015). Contoh kasus di Myanmar adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang membawa dampak secara global, termasuk Indonesia yang terkena imbas dengan adanya arus pengungsi yang datang dari Myanmar (Kadarudin, 2018). Oleh karenanya radikalisme dengan mwembawa sentimen agama sangat rentan dalam kasus-kasus yang terjadi belakangan ini.

Ciri kedua adalah bahwa radikalisme tidak lagi hanya terjadi dan bergerak di pinggiran sebagaimana terjadi di masa lalu melainkan berangsek masukke dalam kekuasaan atau terjadi proses *mainstreaming* melalui berbagai cara. Karen Armstrong (2001) misalnya mengatakan bahwa radikalisme, setidaknya di dalam Islam, bukan hanya bekerja di pinggiran melainkan sejak revolusi dan perubahan radikal konstitusi di Iran, mereka masuk ke dalam kekuasaan yang kemudian disusul terjadi di berbagai negara lain dengan pola yang berbeda-beda. Namun, dalam perkembangan selanjutnya kini, proses

masuknya unsur-unsur radikalisme lebih bervariasi dari sekedar revolusi dan perubahan konstitusi. Melainkan ia bisa melalui berbagai cara, dari berkompetisi dalam demokrasi seperti melalui partai politik hingga perebutan jabatan di pemerintahan, serta penciptaan aturan-aturan yang menunjukkan karakter radikal dan konservatif hingga masuk ke dalam pengajaran dan kurikulum pendidikan sejak dini. Lagi-lagi hal ini tidak hanya terjadi di dalam Islam melainkan juga di hampir semua agama. BPJ pernah memenangkan Pemilu di India dan Ikhwanul Muslim kini berkuasa di Mesir, dan sejumlah Bikhu di Myanmar menyuarakan agar Myanmar menjadikan agama Budha sebagai agama formal negara. Kristen fundamentalis atau yang sering disebut neokon (neo konservatif) menjadi warna dominan dalam pemerintahan Bush yuniordi Amerika Serikat sebelum Barack Obama (Ahmad Suaedy, 2015). Radikalisme pada ciri kedua ini adalah radikalisme akibat imbas kemajuan teknologi dan modernisasi budaya lokal, sehingga kearifan local sudah tidak dapat mencegah karena sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Dengan demikian, kolaborasi antara radikalisme dan kekuasaan tidak hanya dilakukan dengan revolusi dan perubahankonstitusi melainkan dengan berbagai saluran yang ada di dalam strukturpolitik, sosial dan budaya. Dengan demikian, setidaknya, ada dua kecenderungan yang perlu dicermati tentang radikalisme ini: yaitu kian tidak teridentifikasi asal-usul, *locus*, maupun sebab-musabab dari radikalisme itu sendiri. Kedua, kecendeurngan menggunakan unsur dan alat-alat negara untuk mendesiminasi dan bahkan pemaksaan terhadap paham radikal tertentu. Meskipun jumlah mereka kecil tetapi karena

kefanatikan dan pandangan mampu memobilisasi massa dan memprovokasi pihak lain. Berbagai kekerasan terhadap kelompok lain atas dasar agama dilakukan oleh sekelompok kecil orang tetapi dampaknya besar dalam masyarakat. Demikian juga penggunaan alat kekuasaan dan lembaga pendidikan untuk memaksakan pandangan radikal dan intoleransi berdampak besar bagi kehidupan masyarakat karena efektivitas dari suatu sistem politik (Ahmad Suaedy, 2015). Sistem politik yang menghalalkan segala cara dapat berakibat fatal, karena pengerahan massa dengan membawa unsur agama, budaya, suku, dan lain sebagainya sangat gampang menyulut kemarahan dan emosi, oleh karenanya politik identitas harus segera ditinggalkan dengan mempertimbangkan keutuhan NKRI di masa yang akan datang.

Dari pemaparan ciri-ciri radikalisme di atas, dapat kita renungkan secara Bersama bahwa potensi terjadinya radikalisme di masyarakat sangatlah besar, dan radikalisme ini jika dibiarkan dapat mengarah ke tindakan terror (terorisme), oleh karena itu implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme perlu diupayakan secara maksimal. Kearifan lokal sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah ciri adat ketimuran Indonesia, modernisasi tidak akan membawa dampak negatif jika masyarakat sadar dan berpegang teguh dengan kearifan lokal yang ada (masing-masing wilayah), khususnya di Maluku Utara.

B. Program Potensial Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara

Indonesia tengah memasuki fase transformasi dari negara yang berpendapatan menengah (*Middle Income Countries*) mejadi negara berpendapatan tinggi (*High Income Countries*). Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing bangsa merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain, oleh karena itu Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis iptek dan inovasi. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa potensi ekonomi dan inovasi yang ada di daerah merupakan hal penting untuk dikembangkan. Strategi pembangunan di daerah harus difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah (PUD). Berbagai macam PUD yang bisa dikembangkan, antara lain komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura hingga industri kreatif. Menurut Mohamad Nasir (ristekdikti.go.id):

“Inovasi berangkat dari suatu riset yang dapat dikomersialkan. Potensi-potensi yang ada di daerah menjadi sangat penting. Untuk itu saya mohon kepada semua pihak agar terus mendorong semua potensi yang ada di daerah ditingkatkan, agar bertambah nilai kemanfaatannya bagi masyarakat”.

Program ini lahir sebagai upaya untuk mencari dan memanfaatkan peluang bisnis baru di daerah. Menteri Nasir berharap program ini dapat memacu daya saing nasional, karena tingkat daya saing nasional dibentuk dan didukung oleh kemampuan daya saing daerah yang memiliki karakteristik aktivitas ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam, kearifan lokal serta kualitas

sumber daya manusia yang beragam. Menteri Nasir menambahkan bahwa pengembangan ekonomi di daerah berbasis iptek dan inovasi hendaklah sesuai dengan kebutuhan (*demand*) dari industri dan masyarakat. "Dalam pengembangan riset di daerah Industri harus diajak bicara. Industri butuh apa, potensi alam daerah apa". Nasir berharap pertumbuhan riset dan inovasi di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan tingkat perekonomian masyarakat di daerah. "Mari berinovasi untuk negeri. Mari berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat" (ristekdikti.go.id). Program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya perlu didukung oleh sentuhan iptek yang di inisiasi oleh perguruan tinggi, pengembangan ekonomi di daerah berbasis iptek dan inovasi hendaklah sesuai dengan kebutuhan dari industri dan masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan perlu dilakukan oleh perguruan tinggi di masing-masing wilayah, agar sentuhan iptek dan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Jumain Appe pada kesempatan ini mengatakan bahwa model pengembangan klaster inovasi berbasis PUD ini adalah upaya mendorong kolaborasi dan sinergi peran serta fungsi para aktor inovasi di daerah dalam upaya mengembangkan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan Model Klaster Inovasi dilakukan melalui peningkatan peran perguruan tinggi sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang mampu menciptakan invensi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

daerah berbasis sumber daya lokal. Selain itu, perguruan tinggi dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada. Perguruan Tinggi harus menjadi '*agent of region economic development*'. Peran pemerintah yang optimal dalam merangsang pertumbuhan investasi bisnis, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan dunia usaha/industri yang mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat sesuai etika bisnis, sedangkan komunitas sebagai pihak pemakai barang dan jasa atau *output* ekonomi lebih menyadari pentingnya memakai produk dalam negeri. Jumain dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda dari sosialisasi ini adalah membahas Strategi Kebijakan Penguatan Inovasi dan Program Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD). Kegiatan ini dihadiri 30 provinsi se-Indonesia dari unsur Sekretaris Daerah Provinsi, Balitbangdaprov, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/industri (ristekdikti.go.id). Perguruan tinggi dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada jika sebelumnya melakukan pemetaan tentang kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, karena tentunya kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah memiliki perbedaan dan karakteristik.

Berikut respon masyarakat mengenai implementasi dan program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten

Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan; dan Kota Ternate.

Harus ada kebijakan di dalam Program Pemerintah, harus ada kebijakan populis dan cepat dalam menanggulangi kemiskinan dengan program pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir pada hal-hal negatif. Memberi modal langsung kepada masyarakat agar masyarakat mampu berusaha dalam meningkatkan ekonomi kehidupan masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Samsudin Rasyid / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Kami menyadari bahwa saat ini kami sangat kekurangan fasilitas dalam melakukan pengawasan, di daerah pesisir. Tetapi kami lakukan dengan mengumpulkan kepala Desa untuk turut serta menjaga stabilitas di masing-masing Desa atau kampung. Di Polres yang lakukan langkah-langkah pengamanan dengan cara patroli dengan membagi dua kelompok pengamanan 1 dari jam 8 sampai jam 1, dan kedua dari jam 1 sampai jam 6. Ini kami lakukan dalam rangka menjaga stabilitas di Halmahera Utara (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Irvan Indarta / Kepala Polisi Resort Halmahera Utara).

Peran pemerintah saat ini cukup bagus dalam menanggulangi masalah terorisme maupun radikalisme. Pak bupati dan wakil bupati sering turun ke masyarakat dalam memberikan pengarahan dan pencerahan terhadap masyarakat terkait terorisme. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak terpengaruhi dengan ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan

yang yang menyesatkan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Verdianus Guselaw, M. Toel / Pendeta Sinodhe, Kabupaten Halmahera Utara).

Pemerintah daerah perlu memikirkan kebijakan yang bersentuhan langsung atau dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan melalui bantuan pasar murah, pemberdayaan masyarakat, dan subsidi. Mengenai program-program potensial pemerintah daerah adalah melalui kebijakan-kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kebijakan mengenai pemberian modal usaha kepada masyarakat, membuka akses pasar yang luas terhadap hasil bumi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, menjaga harga pasar pada saat panen agar petani tidak dirugikan, dan yang terpenting adalah perbaikan infrastruktur sehingga akses perekonomian masyarakat menjadi mudah dan terjangkau. Pemerintah daerah perlu turun ke setiap lapisan masyarakat untuk mendengar aspirasi, keluhan, dan harapan-harapan masyarakat secara langsung sehingga ketika hendak mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan tersebut akan tepat sasaran dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Pemerintah harus cepat tanggap mengatasi setiap konflik yang terjadi di masyarakat agar masyarakat hidup tenang dan perekonomian tidak terganggu masalah keamanan, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat adat sebagai manifestasi kesultanan, aparat keamanan dan para pemuda dalam mencegah terjadinya perpecahan,

dengan demikian kondisi akan aman dan terkendali, masyarakat akan aman menjalankan pekerjaannya masing-masing dan perekonomian akan meningkat karena tidak ada gangguan apapun. Pemerintah daerah perlu memikirkan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat, karena ketika masyarakat sejahtera, maka konflik akan jauh karena masyarakat tidak akan berpikiran negatif (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh Keagamaan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat di semua level dan harus ada pemetaan-pemetaan potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga masyarakat perlu menggalinya, nah peran pemerintah daerah untuk mensosialisasikan hasil pemetaan potensi ekonomi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan).

Kemiskinan adalah akar dari tindakan radikalisme, disadari atau tidak, faktor kemiskinanlah yang membuat persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, persepsi negative ini juga berlaku terhadap masyarakat yang kaya terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan inilah yang perlu diatasi pertama kali oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Mengenai program potensial Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemandirian secara ekonomi dan tidak melulu berharap atas uluran tangan pemerintah daerah. Ketika pemberdayaan masyarakat ini tepat sasaran, maka pemberdayaan masyarakat tersebut dapat menjadi contoh atau model bagi masyarakat di wilayah-wilayah lainnya di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, agar pemberdayaan masyarakat ini tepat sasaran maka terlebih dahulu harus dilakukan pemetaan terhadap berbagai potensi yang ada di wilayah-wilayah Kota Tidore Kepulauan, dan tentunya setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda sehingga potensi sumber daya alam tersebutlah yang harus diberdayakan oleh masyarakat sesuai dengan potensi yang ada (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan / Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Isu radikalisme akhir-akhir ini memang sangat meresahkan dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihak kesultanan memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah melalui badan kesatuan bangsa agar upaya-upaya sosialisasi dan upaya-upaya pembinaan terhadap umat beragama dan lebih khusus pada kelompok potensial yang menurut kami berpotensi untuk menjadi atau menganut paham radikalisme, karena kita di Kabupaten Halmahera Barat belum ada paham radikalisme namun secara individu ini berpotensi terjadi, langkah penanganan yang tepat oleh pemerintah daerah saya kira adalah sosialisasi kemudian pembinaan-pembinaan antar

beragama (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus / Tokoh Masyarakat dan MUI Jailolo).

Setiap bentuk pembangunan baik infrastruktur pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sebagainya itu harus ada semangat gotong royong dan kebersamaan, saya rasa itu kunci program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, tidak ada pilihan lain (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ausalmoon M. Hane / Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Program penguatan kepada masyarakat terkait radikalisme harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, dan pemahaman keagamaan, terus dilakukan pemberdayaan masyarakat kepada seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan upaya untuk pencegahan tindakan provokatif kepada kelompok-kelompok tertentu yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Syarif Ali / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat). Perlu adanya kesadaran masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban selalu berjalan dengan baik serta kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Rudi S. Hadi / Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).

Kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam mencegah dan menaggulangi penyebaran Radikalisme maupun Terorisme termasuk paham-paham keagamaan yang menyimpang adalah ; Membentuk sekaligus membiayai beberapa elemen pemerintahan dan stakeholder yang terhimpun antara lain pada : Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),

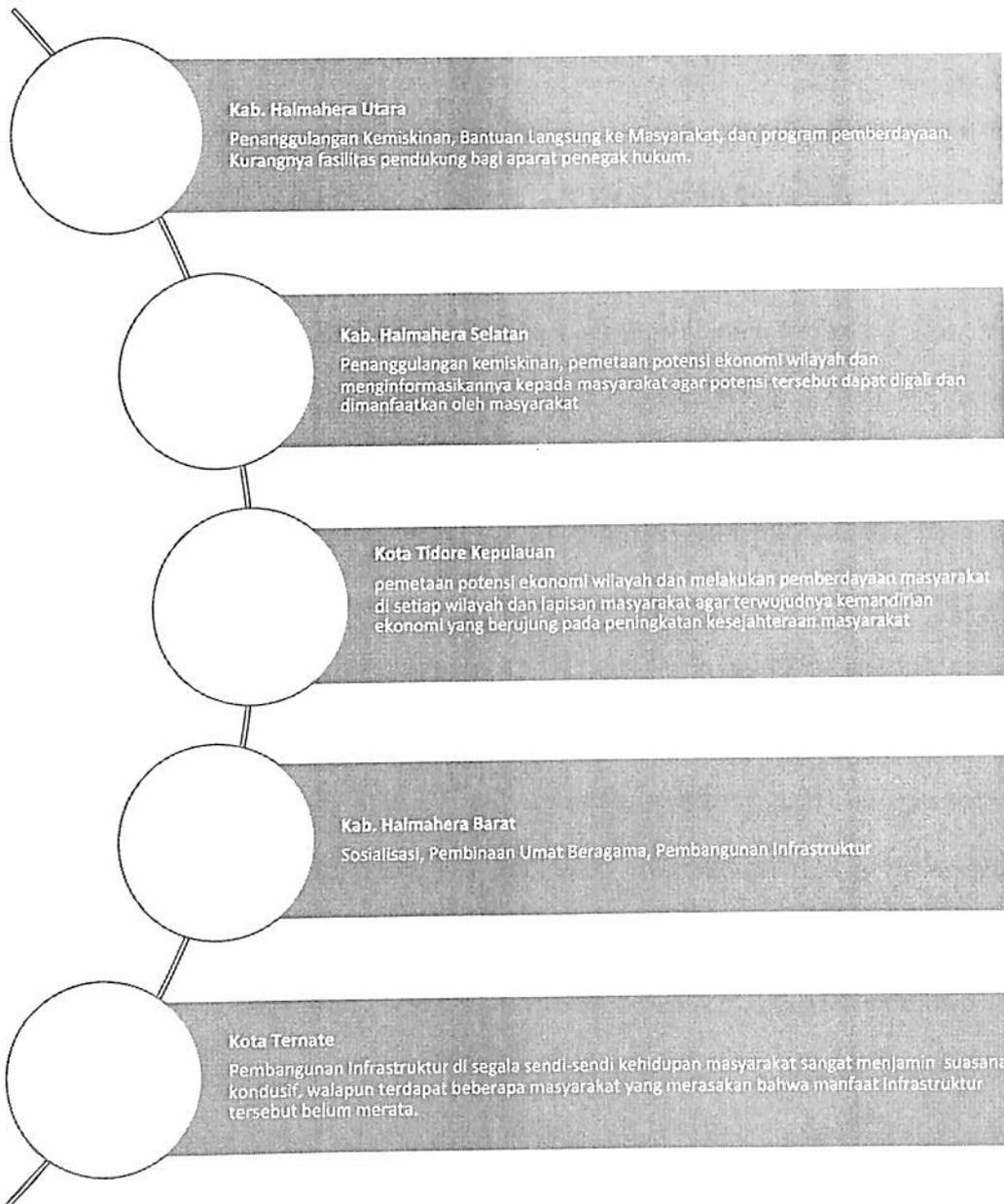
Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negri/Penanganan Konflik Sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB), Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing dan NGO, serta Satgas Gabungan Penanganan Konflik dan Masalah Sosial Tingkat Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, setiap bulan berjalan dilakukan rapat koordinasi langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini. Disamping peran forum dan elemen tersebut diatas terutama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang selalu melakukan pendekatan dan edukasi tentang pentingnya kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, sampai saat ini dapat dikatakan bahwa kondisi toleransi umat beragama dalam kota Ternate dapat terjalin baik, aman dan senantiasa kondusif. Pendekatan ini juga makin menciptakan suasana dan harmonisasi hubungan dan pergaulan inter dan antar umat beragama. Untuk lebih menjamin suasana kondusif dan gairahnya kehidupan masyarakat, maka secara terprogram, Pemerintah Kota Ternate setiap tahun membangun infrastruktur pelayan dasar terutama pelayanan dasar Insfrastruktur ekonomi, pelayan kesehatan, pendidikan, agama, social dan budaya serta lingkungan diantaranya pelayanan air bersih, kebersihan lingkungan dan penerangan. Walaupun patut diakui belum secara merata menyentuh masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate).

Patut diakui bahwa Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Kota Ternate telah membangun hubungan yang cukup erat dengan pihak Kesultanan namun masih sebatas pada upacara-upacara ritual dan kegiatan yang bersifat seremonial. Sementara kearifan lokal yang diantaranya ada yang

mengandung ajaran moral, terutama tentang ajaran toleransi, saling menghormati, memelihara persaudaraan dan kebersamaan dalam keanekaragaman belum disambut secara bersama untuk menjadi nilai sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ridwan Dero / Kalem Kesultanan Ternate).

Yang dirasakan oleh masyarakat adalah belum adanya keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun hukum yang masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kenyataannya masih menjadi sumber pemicu adanya gerakan atau aksi terutama dari kelompok pelajar. Terasa menonjolnya ketimpangan penguasaan aset ekonomi antara penduduk asli dengan pendatang. Oleh karena itu perlu penciptaan keseimbangan kepemilikan dan penguasaan aset ekonomi secara adil dan merata dalam kehidupan masyarakat terutama para pengusaha kecil sehingga tidak dijadikan pintu masuknya paham-paham yang dapat memprovokasi masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Mas'ud Subarjo / Tokoh Masyarakat di Kota Ternate)

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipetakan program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara sebagai berikut:



Salah satu dari visi misi Presiden Joko Widodo adalah mengajak seluruh elemen pemerintah untuk kembali pada prinsip dasar, yaitu menciptakan *service delivery system* yang memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk menikmati hasil pembangunan melalui seluruh sektor

pembangunan. Pelaksanaannya sendiri diarahkan pada sektor-sektor kunci yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan yaitu perdesaan, pesisir, daerah sekitar hutan, dan daerah terpencil. Saat ini, isu kesenjangan digunakan sebagai instrumen *Key Performance Indicator (KPI)* bagi seluruh penyelenggara dan lembaga negara, khususnya yang terkait langsung dengan isu kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan. Dari tahun 2009 hingga 2014, tren kondisi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia terus mengalami penurunan namun penurunannya melambat sejak tahun 2011, yaitu kurang dari 1 juta penduduk miskin per tahunnya. Di saat yang bersamaan, terjadi perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk miskin sehingga penurunan angka pengangguran sejak tahun 2012 pun cenderung melambat, yaitu kurang dari 0,3% per tahunnya (Darfison, 2016). Pada sektor-sektor kunci inilah seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan yaitu perdesaan, pesisir, daerah sekitar hutan, dan daerah terpencil yang harus menjadi program prioritas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar pemerataan pembangunan di setiap wilayah dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.

Di Indonesia, penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah diperkirakan berjumlah 47,3 juta orang yang terdiri dari nelayan, petani gurem, pekerja informal perkotaan, serta pekerja industri mikro dan kecil. Ditambah dengan jumlah masyarakat miskin tanpa aset yang diperkirakan sejumlah 17 juta orang, maka perkiraan jumlah masyarakat sangat miskin berjumlah 64,3

juta orang. Masalah utama dibalik angka ini adalah adanya ketertinggalan pada kualitas, produktivitas, dan daya saing SDM yang bersangkutan. Selain itu, ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi karena berbagai faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Adapun kondisi makroekonomi yang mendorong terjadinya ketimpangan ini adalah karena alokasi upah yang tidak sepadan di beberapa sektor, perubahan komposisi kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga terjadinya *booming* komoditas tertentu yang hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Masyarakat miskin pun masih belum mampu untuk memperoleh akses untuk sumberdaya produktif. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memperoleh sumberdaya produktif seperti pelatihan dan lembaga keuangan disebabkan oleh minimnya akses mereka terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan. Kurangnya akses kesehatan dan infrastruktur mengambil tempat pada alokasi pendapatan mereka yang sudah sangat minim, sehingga sulit untuk mengakses pendidikan jika tidak ada pendidikan gratis. Minimnya pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat kurang mampu, ditambah dengan pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang cenderung tinggi menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya kemiskinan di Indonesia (Darfison, 2016). Faktor kemiskinan inilah yang perlu ditanggulangi dan ditaktisi oleh pemerintah daerah, keefektifan institusi seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan institusi-institusi lainnya yang terkait secara teknis dalam mendata dan memerangi kemiskinan perlu dipertanyakan, terlebih mereka menggunakan anggaran negara.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2019 berada di antara 7,0% – 8,0% atau menurun sebesar 2,5% dari perkiraan angka kemiskinan di akhir tahun 2015. Target ini akan dicapai dengan berbagai strategi yang direncanakan dalam arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan atau P2B. P2B adalah pengembangan sektor unggulan dan potensi lokal, perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro, peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan, dan optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif bagi masyarakat kurang mampu. Strategi ini ditujukan untuk mendorong masyarakat kurang mampu agar lebih mandiri secara ekonomi dan lebih kuat dalam hal kohesi sosial dengan penguatan pada aspek peningkatan keterampilan, serta akses terhadap modal dan pasar. Untuk strategi ini, dilakukan beberapa program pengembangan mata pencaharian dan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat/PKKPM (Darfison, 2016). PKKPM ini menjadi unggulan pemerintah setidaknya untuk saat ini, sehingga strategi nasional melalui PKKPM ini perlu didukung oleh setiap elemen pemerintah dan masyarakat.

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) merupakan kegiatan dari strategi utama dalam Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) untuk

pengembangan mata pencaharian dan infrastruktur pendukung ekonomi. PKKPM memiliki sasaran kecamatan miskin dan rumah tangga kurang mampu; tersebar di 183 kecamatan yang tersebar di 102 kabupaten. Pelakuan program ini nantinya akan *by name by address* masyarakat miskin berdasarkan indeks kemiskinan wilayah (IKW). Dengan demikian, pemanfaatan sasaran sangat jelas individu-individunya dan dapat dipertanggungjawabkan. PKKPM bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan pedesaan yang dapat mendorong peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan. Peruntukkan PKKPM dengan pemberian pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana prasarana ekonomi, serta pendampingan. Sumber utama pendanaan PKKPM berasal dari APBN yang tertuang dalam sumber utama dana program PKKPM (APBN 2015). Sumber pendanaan PKKPM lainnya berasal dari APBD Provinsi (dukungan pembinaan), APBD Kabupaten (dukungan pembinaan), swadaya masyarakat, serta partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat (Darfison, 2016). Peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan perlu dimaksimalkan, sehingga pemerintah pusat, gubernur beserta jajarannya, bupati/walikota dan jajarannya berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan warga masyarakat di wilayahnya.

C. Program-Program Alternatif yang Penting Dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara

Program BNPT/FKPT harus turun langsung kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Karena selama ini khususnya di Halmahera Utara belum tersentuh dengan program BNPT atau FKPT (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Samsudin Rasyid / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Bihak BNPT dan FKPT Maluku Utara harus berkoordinasi dengan semua pihak guna kearifan lokal yang ada di Maluku Utara perlu tetap dijaga, dilestarikan, dihormati dan ditaati dengan baik. Arus globalisasi yang mulai menggeser nilai-nilai kearifan lokal harus perlu ditangani dengan baik oleh semua pihak, sehingga peran dari FKPT Maluku Utara perlu terus mensosialisasikannya ke masyarakat di semua lapisan, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak kesultanan/perangkat yang ada di Maluku Utara. Masyarakat di semua level harus disentuh oleh FKPT Maluku Utara, utamanya melalui informasi-informasi mengenai radikalisme dan upaya terorisme yang secara tidak sadar dapat merasuk ke masyarakat dengan salah satu gejalanya adalah konflik, baik itu konflik agama, konflik sosial, konflik wilayah, konflik kelompok, dan bebrbagai konflik lainnya. FKPT Maluku Utara perlu memberdayakan masyarakat utamanya para pemuda sebagai generasi kilenial dan penerus masyarakat berikutnya, pembinaan juga diberikan kepada perempuan dan masyarakat rentan yang menjadi korban kekerasan dan konflik sosial, serta FKPT Maluku

Utara perlu memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, karena mengingat salah satu akar terjadinya konflik sosial di masyarakat adalah faktor ekonomi atau kemiskinan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan).

Alhamdulillah, dengan metode sosialisasi yang intens serta pelibatan komunitas-komunitas masyarakat dalam berbagai program telah memberikan dampak positif. Kondisi sosial kemasyarakatan cukup terkendali dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang bernuansa provokatif. Kami berharap ke depan, berbagai program di tingkat lokal bisa bersinergi dengan FKPT maupun BNPT sehingga membri dampak lebih masig bagi kesadaran masyarakat untuk mencegah radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Walid Muhammad / Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan).

Pemuda Kampung dan Garda Nuku berupaya membentuk karakter kaum muda, hal tersebut dilakukan dengan membentuk Sekolah Pesisir yang setiap minggu sekali mengajarkan anak-anak tentang literasi, *public speaking* dan diselingi dengan kegiatan sepak bola melalui wadah SSB di beberapa kelurahan. Sedangkan Garda Nuku bergerak di bidang seni dan kebudayaan. Menghimpun komunitas anak muda mendirikan sanggar seni musik, kerajinan dan lain-lain untuk budaya. Selama ini, berbagai kegiatan tersebut masih sebatas peran internal dan belum ada kerjasama dengan pihak lain. Tentu, kita berharap adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga berkompeten dengan yang kami lakukan, termasuk BNPT dan FKPT Maluku Utara dalam rangka

menciptakan daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan / Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Peningkatan kesejahteraan sangat penting dan harus menjadi program prioritas dalam mencegah terjadinya radikalisme di masyarakat. FKPT juga perlu berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan guna menghimpun data-data lapangan terkait dengan kondisi *real* di masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Roy Edwin Tjey / Tokoh Masyarakat Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat).

Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Halmahera Barat sejauh ini berjalan baik. Antar umat beragama dan pemerintah secara umum memiliki hubungan yang sangat baik, namun ada beberapa persoalan yang muncul seperti adanya aliran-aliran pemahaman baru diantara umat beragama. Namun, Bupati sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun hal tersebut mempengaruhi kerukunan antara umat beragama, pemerintah daerah dan dari pihak Kesultanan Jailolo ada forum antar umat beragama yang selama ini berjalan secara baik sehingga dapat menangkal persoalan-persoalan tersebut (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus / Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Program-program melalui sosialisasi kepada masyarakat dan di bentuk satuan tugas (satgas) anti radikalisme di tingkat daerah (kabupaten/kota) yang belum ada di Kabupaten Halmahera Barat sehingga FKPT Maluku Utara dapat berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam mencegah radikalisme. Satgas

ini bertugas untuk memberikan pemahaman upaya pencegahan radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus / Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Upaya pencegahan radikalisme oleh FKPT Maluku Utara adalah sosialisasi di masyarakat, hanya saja saya sampaikan bahwa semangat kebersamaan kembali pada jati diri sebagai masyarakat adat dan budaya ini harus dibangun di berbagai media sosial sehingga apa yang dilakukan forum-forum diskusi bisa tersosialisasi secara luas dengan baik utamanya para generasi milenial. Dalam semangat inilah radikalisme dapat segera dicegah dan ditanggulangi. hal ini sebagaimana kita harus kembali ketiap-tiap agama masing-masing demi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Halmahera Barat, karena sejauh ini saya sangat bersyukur karena belum ada potensi-potensi perpecahan, walaupun dalam konteks pilkada ada reak-reak perbedaan tetapi sebagian besar komponen masyarakat masih tetap dapat dijaga dengan hubungan yang baik (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ausalmoon Raffane / Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi yang dipusatkan di ibukota kabupaten, kecamatan dan di desa sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. FKPT harus bekerjasama dengan bagian kesatuan bangsa di Pemda agar upaya pencegahan radikalisme di Kabupaten Halmahera Barat

dapat tertangani dengan baik (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Syarif Ali / Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat).

Program yang terkait dengan penanggulangan radikalisme ini sebenarnya sudah kami lakukan yaitu melalui babinkabtin, dimana mereka diarahkan untuk mengatasi dimana mereka melakukan deteksi dini terkait dengan orang-orang yang baru ini di desa pembinaan mereka sendiri dengan bukti bahwa pertama mereka berkordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan serta kepala desa mengajak agar saling mengawasi dan memonitor deteksi terkait dengan adanya orang-orang baru yang masuk di desa mereka. Kemudian yang kedua kami juga melakukan upaya patroli setiap hari Sabtu sampai dengan malam Minggu di penginapan-penginapan dan didata, khusus orang yang dari luar Maluku Utara diperiksa KTP-nya dan ditanya keperluan dan maksudnya dan tujuan apa dan sampai kapan akan meninggalkan kabupaten. Hal itu kita lakukan dengan maksud agar dapat mendeteksi adanya orang baru dan tujuannya masuk ke Kabupaten Halmahera Barat, sehingga segala bentuk upaya tindakan radikal dapat terdeteksi dan dicegah secara dini (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Rudi S. Hadi / Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).

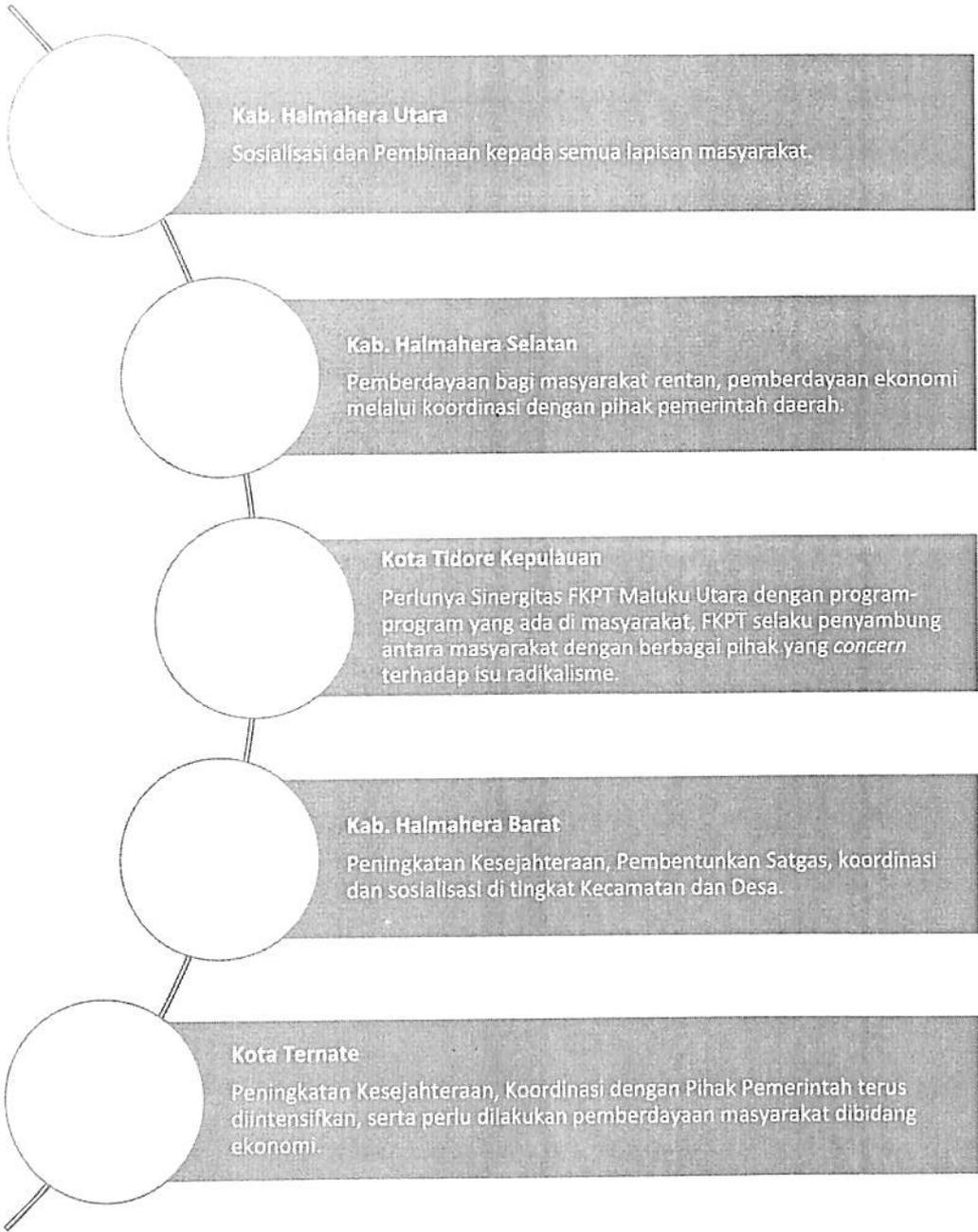
Walaupun telah dibubarkannya HTI namun perlu diwaspadai terhadap orang-orangnya karena ada yang terdiri dari para intelektual sehingga dikuatirkan dapat menyebarkan paham dengan cara atau modus yang tersembunyi kepada masyarakat terutama pada segmen masyarakat yang lemah terhadap isu-isu provokatif. Langkah Pemerintah Kota Ternate dengan membentuk berbagai

forum dan elemen baik formal Pemerintah maupun Satuan-satuan sosial dengan mengambil langkah koordinatif secara rutin dalam rangka deteksi dini dan cegah dini, dinilai cukup efektif untuk mencegah kemungkinan adanya paham radikalisme dan terorisme masuk ke masyarakat. Walaupun potensi ancaman terorisme belum menyentuh masyarakat kota Ternate dan walaupun kelompok/organisasi Radikalpun belum pernah berbuat kekerasan ditengah masyarakat namun perlu diwaspadai adalah dinamika pola perubahan rekrutmen dari sasaran fisik ke pola pikir/cuci otak. Oleh karena itu FKPT secara sinergitas dengan berbagai elemen yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan stakeholder harus terus melakukan sosialisasi tentang pencegahan paham Radikalisme dan Terorisme secara lebih luas menyentuh masyarakat (kelompok/komunitas, termasuk paguyuban atau kerukunan keluarga yang berasal dari luar daerah, Ketua RT, Ketua RW, Perangkat Kelurahan dan Pengurus mesjid). Langkah kearah ini juga dimaksudkan agar masyarakat walaupun dalam segmen dan basis-basis terkecil namun dapat menguatkan daya tangkal, ikut bertanggung jawab dan dapat diberdayakan dan menjadi filter mencegah paham radikalisme dan terorisme maupun gangguan ketertiban lainnya (Data Lapangan di Kota Ternate).

FKPT dapat meyumbangkan saran dan pemikiran agar Pemerintah perlu memperhatikan dan mengedepankan program dan kegiatan yang mengarah kearah pemerataan kepemilikan aset dan kesempatan berusaha dikalangan masyarakat terutama bagi penduduk asli sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mengarah ke gangguan semangat toleransi.

Disamping itu bahwa rendahnya kepemilikan aset ekonomi seseorang yang tidak mampu menopang kehidupan keseharian dikuatirkan mudah dimasuki isu-isu provokatif. Oleh karena itu Pemerintah disamping menyiapkan infra struktur pelayanan, juga perlu dilakukan langkah-langkah peberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Para Da'i disamping mendakwahkan toleransi dan kedamaian, juga ikut menda'wakan materi-materi yang produktif dan kontekstual (mencegah kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi). Kehidupan masyarakat Adat dalam Kesultanan yang senantiasa menjaga nilai-nilai kearifan hendaknya dipelihara dan dilestarikan. Dalam pada itu hubungan Pemerintah dengan pihak Kesultanan, hendaknya tidak sebatas seremonial tetapi lebih jauh harus ikut mengangkat nilai-nilai kearifan menjadi nilai interaksi dalam pergaulan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ajaran moral tentang menjaga kebersamaan, toleransi dan kasih sayang serta adanya ikatan emosional secara kolektif mencegah paham-paham Radikalisme, Terorisme dan dan faham-faham sesat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipetakan program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara sebagai berikut:



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka tim peneliti dapat menarik poin-poin penting sebagai berikut:

1. Implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara adalah kearifan Lokal Efektif Mencegah munculnya Radikalisme dan Tindakan Radikal, Walaupun Kearifan Lokal sudah mulai ditinggalkan, namun peran pihak kesultanan, FKUB, Kepolisian, dan Tokoh masyarakat sangat efektif dan tergolong berhasil. Figur seorang Sultan juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik di masyarakat.
2. Program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara adalah Penanggulangan Kemiskinan, Bantuan Langsung ke Masyarakat, dan program pemberdayaan, pemetaan potensi ekonomi wilayah dan melakukan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayah dan lapisan masyarakat agar terwujudnya kemandirian ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sosialisasi, Pembinaan Umat Beragama, serta Pembangunan Infrastruktur di semua sektor kehidupan masyarakat dan yang paling penting pembangunan tersebut harus merata agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

3. Program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara adalah Sosialisasi dan Pembinaan kepada semua lapisan masyarakat, Pemberdayaan bagi masyarakat rentan khususnya dibidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui koordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka tim peneliti dapat merekomendasikan 3 hal penting sebagai berikut:

1. Kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara perlu terus dijaga.
2. Program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara adalah perlunya memperbaiki fasilitas pendukung bagi aparat penegak hukum.
3. Perlunya Sinergitas FKPT Maluku Utara dengan program-program yang ada di masyarakat, FKPT selaku penyambung antara masyarakat dengan berbagai pihak yang *concern* terhadap isu radikalisme dan Peningkatan Kesejahteraan, Pembentukan Satgas, koordinasi dan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Buchori Masruri, *Akar-Akar Radikalisme Atas Nama Agama*, Makalah 2005, di akses di <http://ummatipress.com>
- Abdul Munip, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Islam Volume I Nomor 2, Desember 2012.
- Adi Sulisty, *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, Makalah di Universitas Pertahanan, 2014.
- Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9 Nomor 2, 2015.
- Ahmad Suaedy, *Menangkal Radikalisme dengan Pendekatan Lokal*, 2015 (Online), akses di <http://www.gusdurian.net/id/article/kajian/Menangkal-Radikalisme-dengan-Pendekatan-Lokal/>
- Birkah Latif dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2013.
- BNPT, *Laporan Hasil Survey Nasional Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di 32 Provinsi Se-Indonesia*, Jakarta: BNPT, 2017.
- BNPT, *Pedoman Penelitian Pendalaman Bidang Pengkajian dan Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Sebagai Dasar Pembuatan Policy Brief Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Daya Tangkal*, Jakarta: BNPT, 2018.
- Darfison, *Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Desa*, 2016.
- Efrizal Lubis, *Penguatan Kearifan Lokal dalam Rangka Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme*, 2016.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

_____ dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Iman Fauzi Ghifari, *Radikalisme di Internet*, Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya, Volume 1 Nomor 2, Maret 2017.

Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial, Reformasi, Refolusi, atau Manusia Besar?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Kadarudin, *International Refugees in Indonesia: Problems and Solutions*, Centre for International Law, Faculty of Law, National University of Singapore, 2018.

L. Muarofah, 2014, Kajian Teori Konflik, <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>

Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali, 2000.

Menristekdikti: Inovasi Harus Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Online), akses di <https://www.ristekdikti.go.id/menristekdikti-inovasi-harus-mampu-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat/#thZkZxsyEMeclXYq.99>

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

Nam Rumkel, dkk. *Pemetaan Potensi Pemahaman Radikalisme di Maluku Utara yang Berbasis Pada Kearifan Lokal*, Jakarta: BNPT, 2015.

Pengertian radikalisme di akses di www.artikata.com

Pengertian radikalisme di akses di http://www.referensimakalah.com/2012/01/pengertian-fundamentalisme-radikalisme_8767.html

Pengertian terorisme di akses di <http://id.wikipedia.org>

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001. Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas terbuka 1994.

Rudi Haryanto, 2015, *Pengertian dan Jenis Perilaku Penyimpangan Sosial*, <http://sapakabar.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-dan-jenis-perilaku-penyimpangan-sosial.html>

Saifuddin, *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru*, Analisis, Volume XI Nomor 1, Juni 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Susanti, *Kendala Radikalisme dalam Mewujudkan Civil Society di Indonesia*, Makalah Universitas Terbuka, tanpa tahun.

Umma Farida, *Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran dan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Volume 10 Nomor 1, Februari 2015.

Wahid Hambali, *Radikalisme*, Makalah, 2013.

Wilner., A, & Dubouloz., C-J, *Homegrown Terrorism and Transformative Learning: An Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization*, Ottawa: Canadian Political Science Association Conference, 2009.

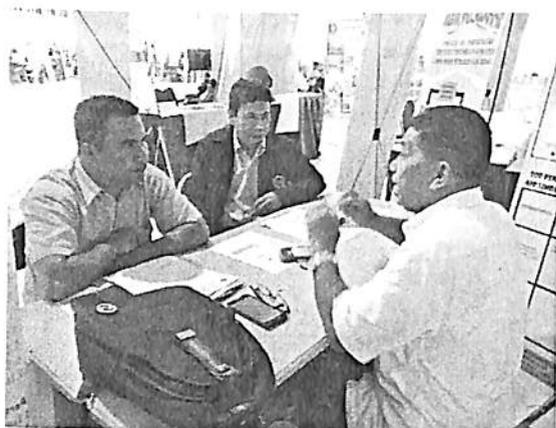
Dokumentasi di Kabupaten Halmahera Utara



(1)



(2)



(3)



(4)



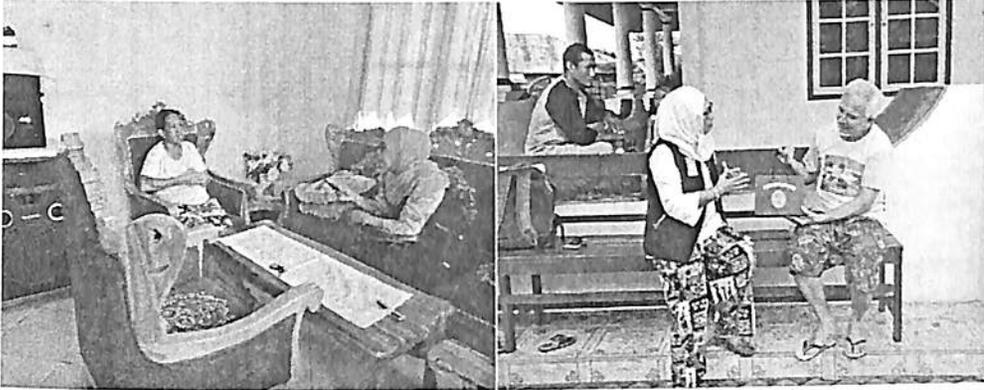
(5)

Keterangan:

1. Anggota tim peneliti dengan Samsudin Rasyid (Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

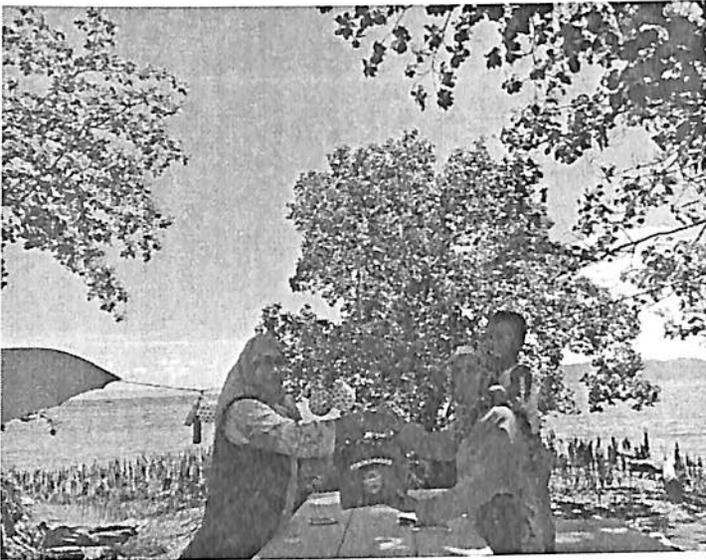
2. Anggota tim peneliti dengan Irvan Indarta (Kepala Polisi Resort Halmahera Utara).
3. Anggota tim peneliti dengan Verdianus Guselaw, M. Toel (Pendeta Sinodhe, Kabupaten Halmahera Utara).
4. Anggota tim peneliti dengan M. Roke Saway (Tokoh Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara).
5. Anggota tim peneliti dengan Hi Jaksa Samaun (Tokoh MUI Kabupaten Halmahera Utara).

Dokumentasi di Kabupaten Halmahera Selatan



(1)

(2)



(3)

Keterangan:

1. Anggota tim peneliti dengan Tokoh Agama, Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Anggota tim peneliti dengan Pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Anggota tim peneliti dengan Tokoh Masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan.

Dokumentasi di Kota Tidore Kepulauan



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Keterangan:

1. Sultan Tidore bersama unsur Pemkot Tidore, Polres Tidore, dan Kodim Tidore menyampaikan materi yang terkait dengan wawasan kebangsaan dalam forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat
2. Anggota tim peneliti dengan H. Husain Sjah (Sultan Tidore, Kota Tidore Kepulauan).
3. Anggota tim peneliti dengan Pihak MUI, Kota Tidore Kepulauan.
4. Anggota tim peneliti dengan Walid Muhammad (Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan).
5. Anggota tim peneliti dengan Dwi Gastimur Wanto (Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Tidore Kepulauan).
6. Anggota tim peneliti dengan Abdullah Dahlan (Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Dokumentasi di Kabupaten Halmahera Barat



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

Keterangan:

1. Anggota tim peneliti dengan Roy Edwin Tjey (Tokoh Masyarakat Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat).
2. Anggota tim peneliti dengan Rudi S. Hadi (Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).

3. Anggota tim peneliti dengan M. Syarif Ali (Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat).
4. Anggota tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus (Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).
5. Anggota tim peneliti dengan Ausalmoon Raffane (Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Dokumentasi di Kota Ternate



(1)



(2)



(3)



(4)

Keterangan:

1. Anggota tim peneliti dengan Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Kota Ternate.
2. Anggota tim peneliti dengan Ridwan Dero (Kalem Kesultanan Ternate).
3. Anggota tim peneliti dengan Mas'ud Subarjo (Tokoh Masyarakat di Kota Ternate).
4. Anggota tim peneliti dengan Usman Muhammad (Ketua MUI Kota Ternate).